



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2017–2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan izin dan perkenan-Nya sehingga penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan dan partisipasi lainnya.

Perubahan struktur kelembagaan dan Nomenklatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga merubah tugas dan fungsi yang diembannya, mengharuskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyusun kembali Renstra Dinas sebagaimana amanah UU Nomor 25 Tahun 2004. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017 – 2021 ini merupakan dokumen perencanaan dan acuan anggaran organisasi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2021 yang memuat program prioritas Bupati Kutai Kartanegara dan menjadi arah juga panduan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi kinerja (Renja-SKPD, RKA, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Indikator Kinerja, program, kegiatan, dan kerangka pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama lima tahun ke depan sebagai upaya pengembangan instansi dalam penyelenggaraan kewenangannya guna memberikan pelayanan bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan bermartabat kepada masyarakat.

Akhirnya, dengan segala upaya semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Draft Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021, kami berharap agar seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat diwujudkan terutama dalam meningkatkan keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah dan layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman dan perdesaan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Tenggarong, 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kutai
Kartanegara



Ir. WISAKSONO SOEBAGIO, MT
NIP 19610927 1999003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	5

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6
2.2. Sumber Daya SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	27

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34
4.3. Strategi dan Kebijakan	39
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	40
Bab VI INDIKATOR KINERJA DINAS PRUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	44
Bab VII PENUTUP	45
LAMPIRAN	48

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, nasional dan daya saing global. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menangani infrastruktur umum seperti taman publik, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah serta infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional. Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman dengan pengarusutamaan gender menjadikan gender sebagai dimensi integral dalam perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebisaaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi).

Dengan pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 memberikan momentum yang paling tepat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuat rencana strategis (Renstra – OPD)

dalam rangka mencapai visi dan misi OPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap OPD. Renstra tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan target kinerjanya yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan anggaran pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai yang bersifat indikatif dan mengacu pada perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih terarah dan terjamin serta tercapainya sasaran strategik pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Renstra dipandang sebagai:

- Merupakan alat bantu bagi manajemen dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Merupakan gambaran visi, misi, tujuan, strategi serta kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Sebagai alat untuk memacu dan memotivasi aparatur serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.
- Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang perumahan dan permukiman.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2017-2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan Pembangunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
4. Menyediakan indikator kinerja keberhasilan sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada peraturan - peraturan sebagai landasan hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara dalam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dasar, maka sistematika penulisan Renstra adalah sebagai berikut:

- BAB I : menguraikan latar belakang yang berisi pengertian, fungsi dan proses penyusunan secara ringkas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Renstra.
- BAB II : menggambarkan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- BAB III : menguraikan Identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah, telaahan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

- BAB IV : mengemukakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan organisasi.
- BAB V : menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VI : menguraikan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII : menggambarkan garis besar rencana strategis pembangunan bidang perumahan dan permukiman.

BAB

II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan dan permukiman.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan permukiman.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan dan permukiman.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perumahan dan permukiman dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

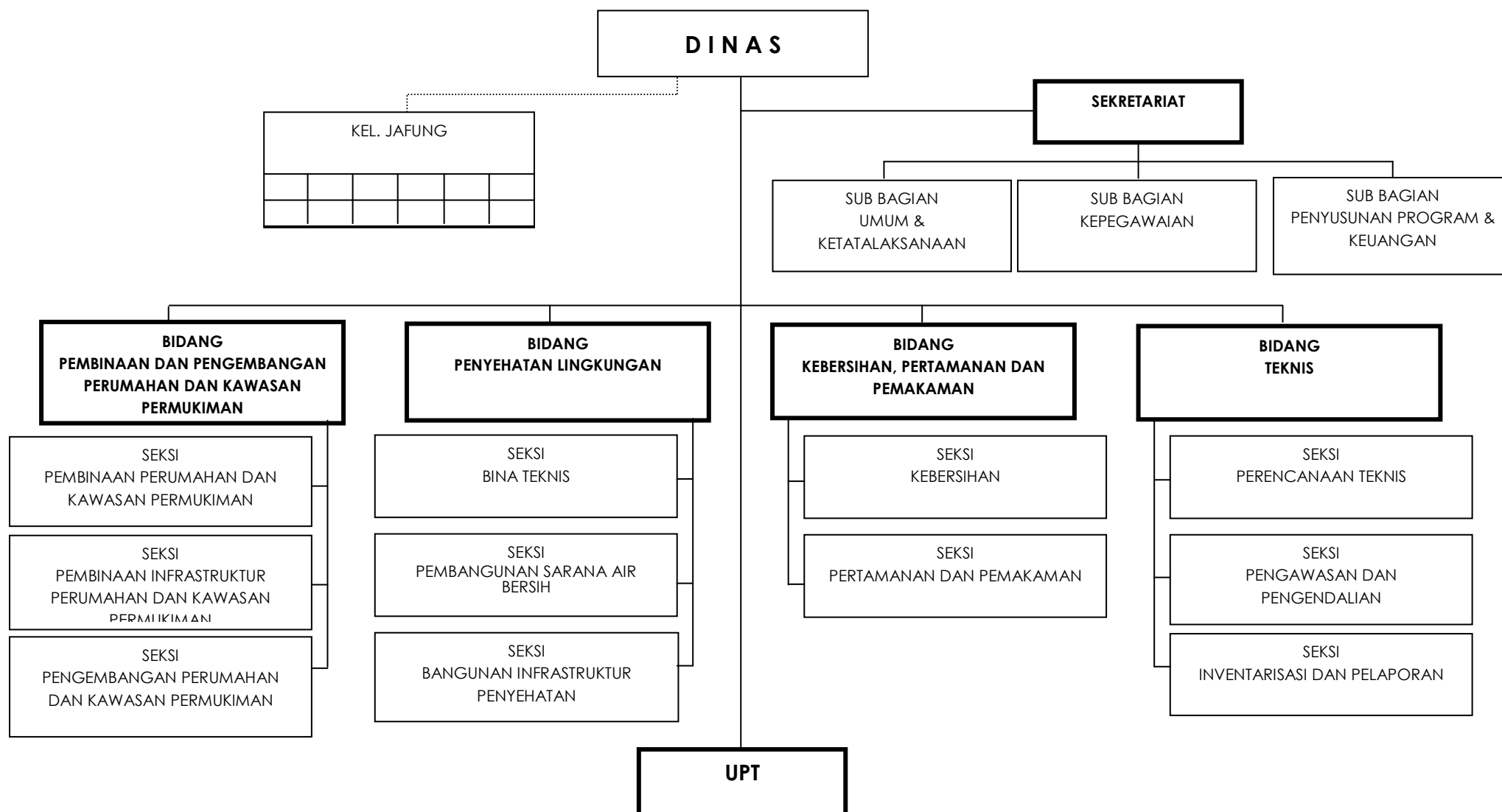
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang pejabat struktural Eselon IIIa, dan 5 (lima) orang pejabat struktural eselon IIIb, yaitu:

1. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

2. Bidang Teknik, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - c. Seksi Inventarisasi dan Pelaporan
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pembinaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Bidang Penyehatan Lingkungan, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Bina Teknik
 - b. Seksi Pembangunan Sarana Air Bersih
 - c. Seksi Bangunan Infrastruktur Penyehatan
5. Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, yang membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Kebersihan
 - b. Seksi Pertamanan dan Pemakaman

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

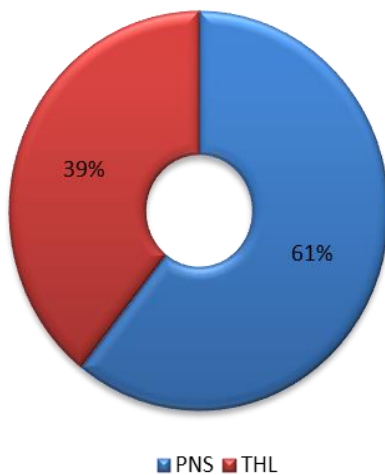


2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

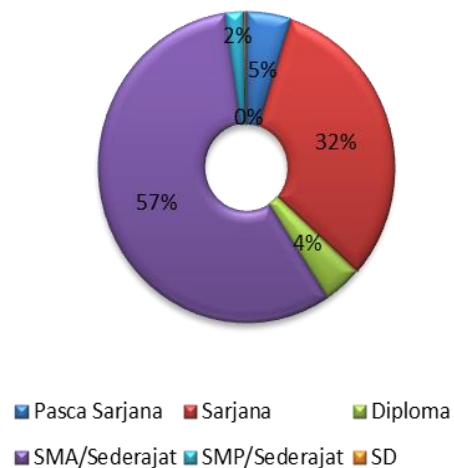
2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 407 orang Pegawai yang bersatatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL). DPKP bisa dikatakan sangat bergantung dengan THL dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dikarenakan jumlahnya lebih dari 39 Persen dari total pegawai. Dilihat dari latar belakang pendidikan, rata-rata pegawai DPP berpendidikan cukup rendah yang secara umum dimiliki oleh tenaga THL dengan karakteristik pekerjaan yang sangat teknis.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan

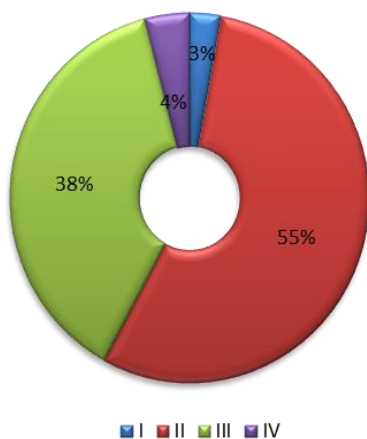
Struktur kelembagaan DPKP menggunakan pola maksimal dengan semua jabatan telah terisi sehingga memiliki pejabat struktural yang cukup banyak, 1 orang Pejabat struktural Eselon II sebagai Kepala Dinas, 5 orang yang menduduki jabatan Eselon III, 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang. Pejabat Eselon IV sebanyak 11 orang yang menduduki jabatan Kepala Seksi sebanyak 11 orang dan Kepala Sub Bagian sebanyak 4 orang. Selain jabatan struktural, DPP belum memiliki pejabat fungsional tertentu, semuanya merupakan pejabat fungsional umum. Dengan



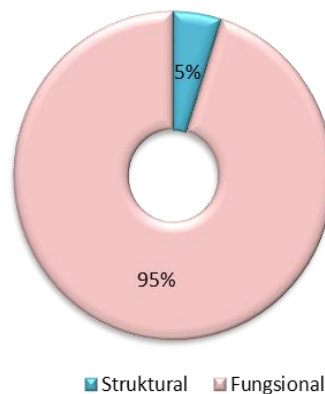
komposisi jabatan dan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai DPKP maka wajar jika sebagian besar masih berada pada golongan II dan III karena tidak adanya kenaikan pangkat pilihan seperti pejabat struktural atau fungsional tertentu.

Ruang lingkup tugas dan fungsi DPKP di bidang Penyehatan Lingkungan, dan bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman memerlukan tenaga teknis lapangan yang cukup banyak dengan komposisi lebih dari 61% dari jumlah pegawai. Hal ini juga menyebabkan jumlah THL sangat diperlukan untuk menyelenggarakan *core business* DPKP.

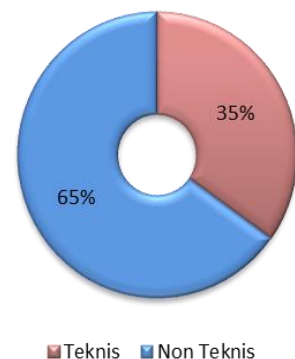
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Keterampilan



Gambar 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan, Jabatan, dan Ketrampilan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKP Kabupaten Kutai Kartanegara, di lengkap dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan roda 2 serta dilengkapi inventaris dan perlengkapan kantor lainnya. DPP memiliki gedung kantor yang berada di lantai II Kantor terpadu Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Sarana dan prasarana yang digunakan oleh DPP dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :



No	Nama Barang / Merk	Jumlah (Unit /Buah)	Kondisi		KETERANGAN
			Baik	Rusak	
1	<u>Kendaraan Roda 4 :</u>				
	Mini Bus	10	8	2	Operasional
	Mobil Tinja	5	5		Pengangkutan Tinja
	Dumk Truck	18	14	4	Pengangkutan Sampah
	Pick Up	3	3		Operasional
	Pick Up (Doubel Cabin)	3	3		Operasional
	Excavator	1	1		
	Tractor	3	3		
2.	<u>Kendaraan Roda 2 :</u>				
	Sepeda Motor (Honda New Mega Pro)	85	70	15	Operasional
3.	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain (Gerobak Sampah/Gerobak Tarik)	21	20	1	Pengangkutan Sampah
4.	P.C	20	19	1	Operasional
5.	Notebook/Laptop	25	25	-	Operasional
6.	Printer	41	41	-	Operasional
7.	Mesin Pencacah Sampah Organik	13	13	-	Mengurai sampah organik
8.	Proyektor / Infokus (Benq/Nec)	4	4		Operasional
9.	Camera (canon/Sony)	10	10		Operasional
10.	Mesin Ganset (Silend/180 Kva)	6	6		Operasional
11.	Mesin Pemotong Rumput	73	73		Perawatan Taman
12.	Kapal Motor (Cess & Kapal Very Kayu)	5	5		Operasional



No	Nama Barang / Merk	Jumlah (Unit /Buah)	Kondisi		KETERANGAN
			Baik	Rusak	
13.	Mesin Fotocopy (Canon)	6	6		Operasional
14.	Tenda 3x3 m	2	2		
15.	Tong Sampah Beroda	100	100		Penampungan sampah sementara
16.	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	106	106		
17.	Mikrophone (Toa/Krezt)	32	32		komunikasi
18.	Handy Talky (Radio Mobile)	77	77		
19.	GBS	5	Baik / Rusak		
20.	Hand Sprayer (Solo)	-	-		Operasional
21.	Digital Multimeter	10	10		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Cakupan Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah

Pelayanan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang diberikan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten, namun telah mencakup sekitar 72% dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara meskipun secara total kapasitas TPS sudah mencapai 90,15% dari total timbunan sampah. Cakupan ini telah melampaui target nasional pengoperasian TPA sebesar 70%, namun persebarannya tidak merata.

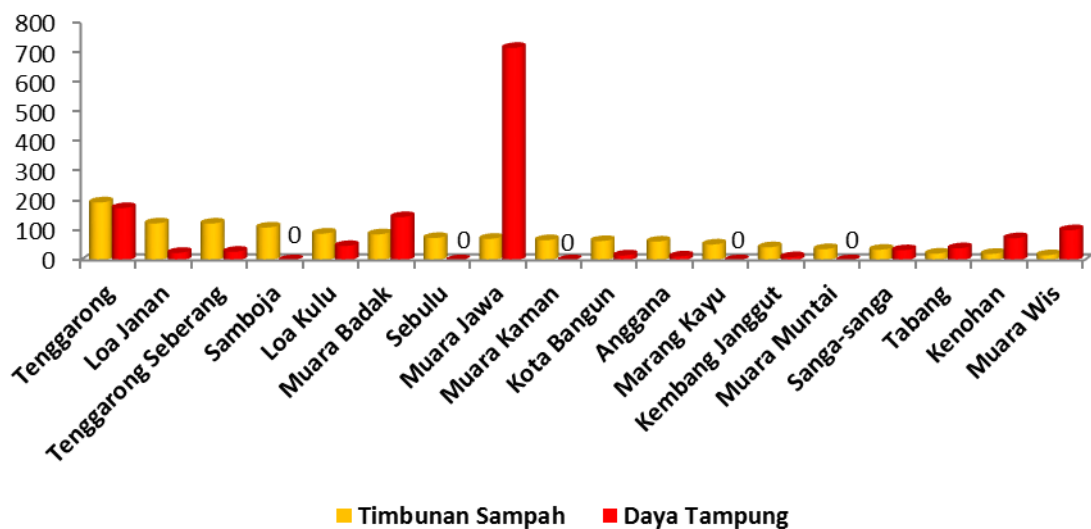
Penyediaan TPS pada 13 kecamatan secara rata-rata masih belum mampu menampung semua timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hanya 4 Kecamatan yang memiliki daya tampung melebihi produksi sampah yang dihasilkan oleh Rumah Tangga bahkan ada yang memiliki TPS dengan kapasitas 7 kali dari sampah yang dihasilkan. Sementara 9 kecamatan lainnya rata-rata memiliki daya tampung di bawah



50%. Luasnya wilayah Kutai Kartanegara dan persebaran penduduk yang belum merata menyebabkan penyediaan TPS belum optimal, apalagi penyediaan TPS membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perkembangan anggaran yang fluktuatif dan cenderung menurun menyebabkan target pembangun TPS yang bersumber dari APBD mengalami pelambanan dalam pertumbuhan.

Tabel 2.1
Kapasitas Penampungan TPS di Kutai Kartanegara

Jumlah jiwa	Timbunan Sampah (m ³)	Daya Tampung TPS (m ³)	Persentase Kapasitas Penampungan Sampah (%)
623,816	1,303.36	1,175.00	90.15



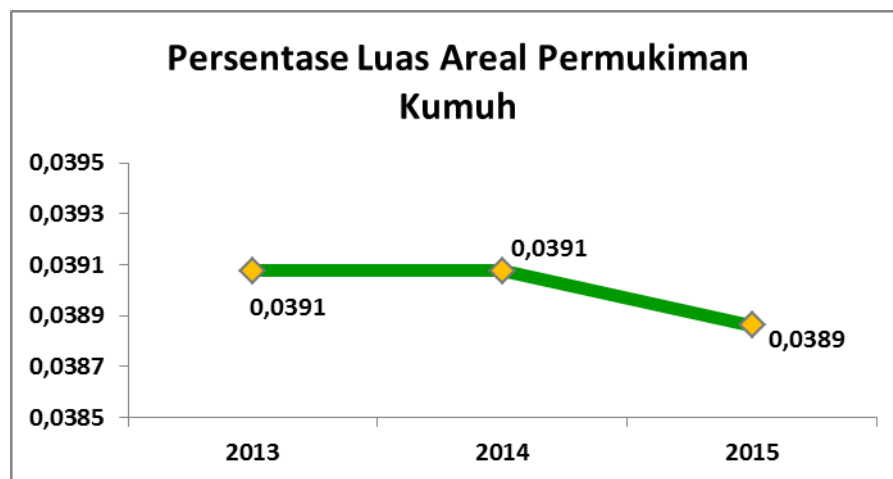
Gambar 2.3
Perbandingan Timbunan Sampah dan Kapasitas Penampungan TPS di Setiap Kecamatan

B. Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh

Areal permukiman kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 1.020,65 ha pada tahun 2013 dan masih bertahan sampai tahun 2014. Luasan ini sebenarnya sangat kecil rasionya terhadap luas wilayah Kutai Kartanegara yang



mencapai 2.611.900 ha, yaitu hanya sekitar 0.039%.(1.081,64 Ha) Pada tahun 2015, areal permukiman kumuh jumlahnya menurun dengan angka yang tidak begitu signifikan, yaitu hanya sebesar 5,63 ha atau sebesar 0,55% dari kondisi awal. Target nasional menurunnya areal permukiman kumuh sebesar 10% pada tahun 2019 masih menyisakan waktu selama 4 tahun dan target tersebut bisa dicapai jika penurunan areal permukiman melebihi angka sekitar 2,4 % setiap tahunnya. Pada tahun 2016 luas wilayah permukiman kumuh sebesar 1.013 Ha. Pola hidup masyarakat di bantaran sungai merupakan penyumbang luasan areal Permukiman kumuh di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi alternative dalam akselerasi penurunan areal permukiman kumuh sebesar 10% pada tahun 2019.



Gambar 2.4
Perkembangan Persentase Luas Areal Permukiman Kumuh

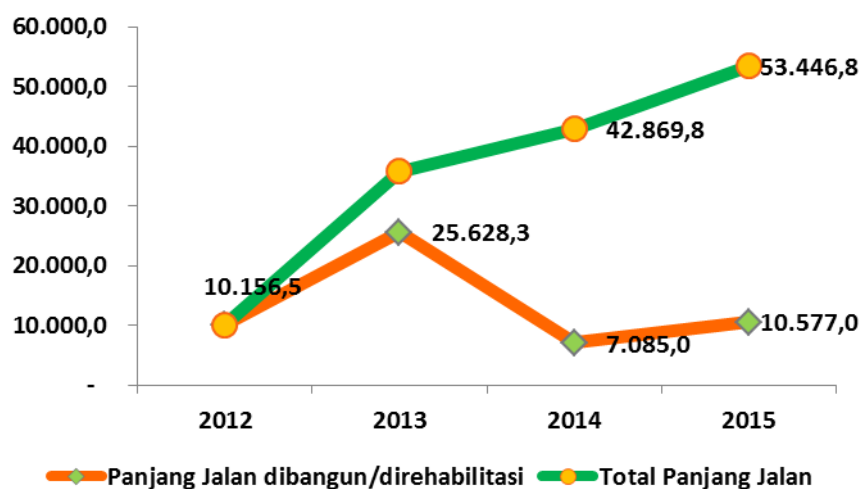
C. Panjang Jalan permukiman yang Dibangun/Direhabilitasi

Aksesibilitas masyarakat dalam mendorong kegiatan perekonomian masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kondisi Jalan umum/utama suatu wilayah, namun juga ditentukan oleh kondisi jalan permukiman dimana masyarakat dapat keluar atau masuk menuju tempat kerja dan ekonomi lokal bisa ditumbuhkan. Pada kurun waktu 4 tahun semenjak pemisahan Bidang Perumahan dan permukiman menjadi Dinas tersendiri, sudah dibangun dan atau direhabilitasi jalan permukiman



sepanjang 4,26 kali dari panjang jalan pada tahun 2012. Program semenisasi yang menjadi program prioritas dalam peningkatan jalan permukiman pada tahun 2013 dapat dilihat dari panjang jalan yang dibangun mendekati 50% dari total panjang jalan permukiman yang dibangun selama 4 tahun terakhir. Hal ini juga selaras dengan alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

Pembangunan jalan permukiman tidak hanya dilakukan di wilayah Perkotaan dengan akses yang mudah dari Ibukota Kabupaten, namun demikian pembangunan jalan permukiman tetap dilakukan secara proporsional terhadap jumlah penduduk dan jumlah permukiman.



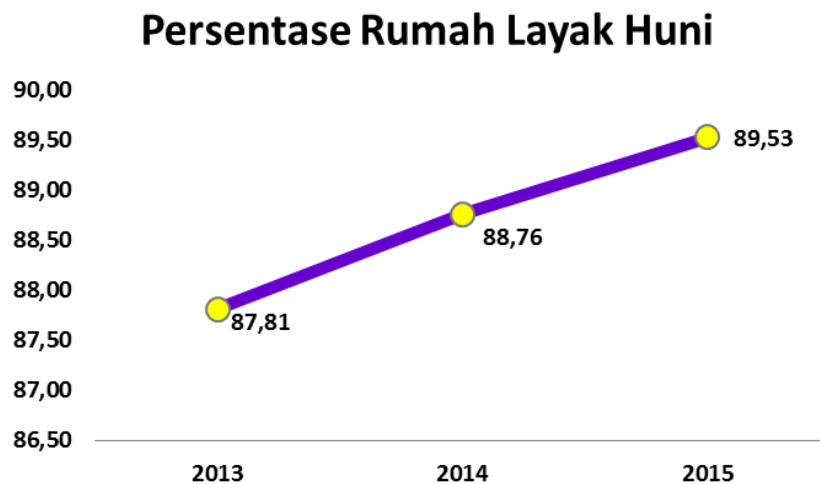
Gambar 2.5
Pembangunan dan Perkembangan Panjang Jalan di Kutai Kartanegara

D. Persentase Rumah Layak Huni

Pemerintah menargetkan menurunnya rumah tidak layak huni sebesar 54,29 % pada tahun 2019 menjadi 1,9 juta pada kurun waktu 2014-2019. Kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap hunian tidak layak huni sebesar 0,56%. Bupati Kutai Kartanegara konsen dalam mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat melalui program pembangunan, rehabilitasi, dan Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang



secara signifikan telah meningkatkan persentase rumah layak huni bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Selama 3 tahun terakhir, Kutai Kartanegara telah meningkatkan proporsi rumah layak huni sebesar 1.72%, yaitu sekitar 1.485 unit rumah sehingga rata-rata tiap tahunnya telah dibangun/direhabilitasi sebanyak 495 unit. Masih cukup banyaknya rumah yang belum layak huni, membuat Kutai Kartanegara khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berpikir ekstra dalam meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat. Hanya mengandalkan APBD bisa jadi baru lebih dari setengah abad bisa diwujudkan semuanya menjadi rumah layak huni, apalagi perkembangan APBD Kutai Kartanegara yang cukup fluktuatif sehingga dapat menyebabkan pembiayaan untuk pencapaian indikator ini menjadi sulit untuk dinaikkan mengingat masih banyak program prioritas lain yang dijanjikan oleh Bupati dan wakil bupati terpilih.

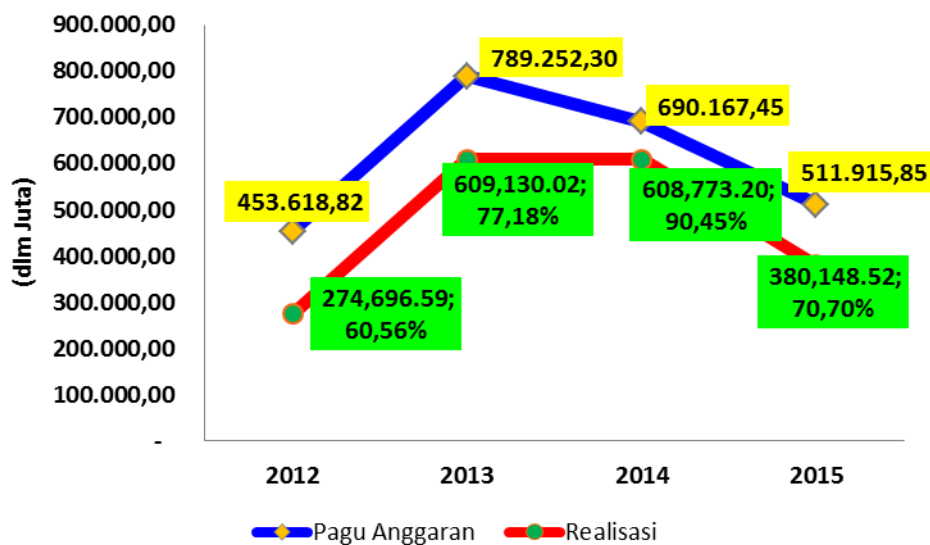


Gambar 2.6
Perkembangan Persentasi Rumah Layak Huni

Dilihat dari Perkembangan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjalankan tugas dan fungsi serta untuk membiayaan program prioritas yang diamanahkan, pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2012 sampai tahun 2015 cukup fluktuatif. Kapasitas fiskal serta program prioritas daerah sangat menentukan besaran pagu yang dialokasikan kepada OPD. Dinas Perumahan dan



Kawasan Permukiman termasuk OPD dengan alokasi anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan OPD lainnya, namun kinerja anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan. Secara rata-rata penyerapan anggaran berada di bawah angka 80%, meskipun sempat mencapai angka 90,45% pada tahun 2014. Kembali rendahnya kinerja anggaran yang dikelola menggambarkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih belum memiliki sistem manajemen pengelolaan anggaran yang baku dalam mendukung pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien untuk merealisasikan indikator kinerja yang ditetapkan sehingga kinerja anggaran yang telah dicapai dengan baik tidak mampu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan seiring dengan tingginya tuntutan kinerja fisik tugas dan fungsi SKPD.



Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2016

Gambar 2.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (sebelumnya Dinas Perumahan dan permukiman) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 - 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara



Dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan pembangunan dengan menempatkan Gerbang Raja sebagai *grand strategy* pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih bersifat inklusif yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemerintah Daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan publik serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, melalui Gerbang Raja, penataan pembangunan di segala bidang menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengarusutamaan gender.

Untuk mendukung Visi, dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan di bidang Perumahan dan permukiman yang diyakini semakin berat dikarenakan dinamisnya perkembangan lingkungan eksternal dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Untuk menentukan faktor - faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, pendekatan yang dilakukan adalah melalui:

- a. Kajian terhadap RPJM Nasional / RPJM Provinsi.
- b. Pendekatan / pola pembangunan yang akan dijalankan.
- c. Permasalahan infrastruktur permukiman dan perumahan, sarana air bersih, persampahan, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan analisa terhadap aspek tersebut, faktor-faktor dominan yang dirasakan menjadi tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

Tantangan

1. Bencana Alam

Khusus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana curah hujan selalu menimbulkan longsornya tebing yang mengakibatkan rusaknya jalan. Curah hujan tinggi seringkali mengakibatkan meluapnya sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Kutai



Kartanegara, masih ada daerah-daerah yang mengalami banjir sebagai akibat dari meluapnya debit air yang melebihi kapasitas tanggul-tanggul yang ada.

2. Luas dan Aksesibilitas Wilayah

Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kutai Timur. Luas wilayah Kutai Kartanegara mencapai 2.571.641 ha (27.263,1 km²) yang secara administratif terbagi menjadi 18 kecamatan dan terbentang dari daerah hulu sampai daerah muara (pesisir laut Jawa). Kawasan hutan memiliki luasan lebih dari 40 % terhadap luas wilayah Kutai Kartanegara. Sementara pemanfaatan untuk permukiman masih dibawah 1 % (BPS, 2013).

Seluruh wilayah Kutai Kartanegara belum terkoneksi melalui jalur darat bahkan sebagian yang telah terkoneksi melalui darat pun kondisi jalannya rusak. Sebagian wilayah, terutama di daerah Hulu, baru bisa diakses dengan jalur sungai dengan biaya transportasi yang tidak murah sehingga menyebabkan indeks kemahalan konstruksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sementara itu, pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.

3. Pola Hidup Masyarakat

Pola penyebaran penduduk Kutai Kartanegara sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar Permukiman penduduk terkonsentrasi di tepi Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Daerah-daerah yang agak jauh dari tepi sungai di mana belum terdapat prasarana jalan darat relatif kurang terisi dengan permukiman penduduk.

Pola hidup di tepi sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sebagian masih mengandalkan air sungai sebagai air baku untuk keperluan sehari-hari. Bahkan digunakan sebagai sumber air minum dan memasak melalui perlakuan mandiri oleh masyarakat terutama di wilayah yang belum memiliki akses PDAM atau sumber air baku lainnya. Ketersediaan jaringan PDAM tidak serta masyarakat



berpindah untuk berlangganan PDAM dikarenakan dibutuhkan biaya pemasangan dan biaya bulanan yang tidak sedikit.

Permukiman di tepi sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sebagian masih terkesan kumuh dengan sampah yang berserakan di bawah kolong rumah terutama akan nampak pada saat sungai surut. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebiasaan masyarakat yang bermukim di tepi sungai belum bisa sepenuhnya menghilangkan kebiasaan membuang sampah di sungai. Kondisi yang sama juga masih banyak terjadi di daerah lain, seperti Kota Samarinda, Jakarta, dll.

Kesadaran untuk membuang sampah oleh masyarakat yang bermukim di daratan juga perlu ditingkatkan. Ketidadaan TPS yang disediakan oleh pemerintah bukan berarti masyarakat boleh begitu saja membuang sampah di sembarang tempat. Sampah belum sepenuhnya dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan.

Peluang (*Opportunity*)

1. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Proses demokrasi telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggungjawabnya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja dinas.

Sementara itu, banyaknya sector swasta yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan dan energi di Kutai Kartanegara dan menjalankan usahanya di Kabupaten ini memberikan peluang untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur permukiman sebagai bentuk kewajiban sektor swasta untuk



mengalokasikan sebagian pendapatannya dalam peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat sekitarnya.

2. Sosial Kontrol

Kemajuan dalam demokrasi telah mengakibatkan berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat. Masyarakat akan semakin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif dalam urusan - urusan publik. Kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan. Dalam konteks pembangunan bidang perumahan dan permukiman, masyarakat bisa dijadikan partner dalam pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang dilakukan baik oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun terhadap aktivitas masyarakat lainnya yang berdampak pada penyalahgunaan atau pelanggaran Tata Ruang wilayah.

3. Keterbukaan Informasi Publik (media untuk penyampaian keluhan masyarakat)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang transparan dan akuntabel sekaligus sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berarti bahwa setiap instansi pemerintah tanpa kecuali harus transparan dan terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan canggih, Keterbukaan Informasi Publik menjadi semakin mudah untuk diwujudkan. Instansi pemerintah dapat memanfaatkan berbagai media sosial tidak berbayar maupun Fasilitas komunikasi elektronik lainnya dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga dapat



menggunakan media-media yang disediakan oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Kebijakan global, regional, dan nasional bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kesepakatan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlaku pada tahun 2015–2030 dan telah diratifikasi Indonesia memiliki konsekuensi diintegrasikannya program SDGs dalam segenap aspek pembangunan di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesepakatan global ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyukseskan terwujudnya *goal* dan sasaran SDGs di wilayah Kutai Kartanegara terutama dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pada lingkup regional, yaitu diberlakukannya kebijakan *Asean Economic Community* (AEC) memberikan peluang bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk turut berperan serta dalam mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang berdaya saing melalui penyediaan kawasan permukiman dan perumahan yang sehat dan layak.

Pada konteks nasional, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla menetapkan arah kebijakan pembangunan perumahan dengan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan permukiman adalah: *pertama*, Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; *kedua*, penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun; *ketiga*, Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; dan *keempat*, peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi. Kebijakan nasional ini menjadi peluang bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengembangkan pelayanan tupoksinya untuk berkontribusi



dalam mewujudkan sasaran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.



BAB

III

ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Perumahan dan permukiman terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang (pembinaan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penyehatan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman, teknis). Adapun permasalahan umum dalam pembangunan prasarana dan sarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Belum terpenuhinya lingkungan permukiman yang memadai
2. Rendahnya penataan perumahan permukiman
3. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat
4. Masih minimnya peyediaan dan pengelolaan air limbah domestik
5. Pembebasan Lahan
6. Belum optimalnya penyediaan TPA dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
7. Belum Terpenuhinya fasilitas pemakaman umum
8. Belum Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Perkotaan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah

Dalam rangka merealisasikan janji kampanyenya kepada masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka lima tahun ke depan, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”. Untuk merealisasikan visi ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi yaitu:

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten
3. Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan daerah
4. Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur menuju daya saing daerah



6. Meningkatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

Dari ketujuh misi di atas, Misi kedua, kelima, dan keenam selaras dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh Bupati kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus menjabarkan 3 Misi tersebut. Sementara itu, Misi pertama bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai *impact* makro jangka menengah daerah, meliputi:

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun
2. Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Menurunnya Gini Rasio
5. Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan
6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
7. Menurunnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson

Target Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi Kepala daerah secara operasional dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Adapun target tujuan dan sasaran dari Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diidentifikasi sebagai berikut:



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk rakyat	Terwujudnya OPD yg efektif untuk rakyat Mewujudkan organisasi yg transparan akuntabel dan profesional	Meningkatkan kepuasan masyarakat layanan OPD Terwujudkan organisasi yg transparan akuntabel dan profesional	1. Predikat Penilaian SAKIP 2. Presentase ASN yg kompeten
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten	Mewujudkan kawasan permukiman diperkotaan dan perdesaan yg nyaman sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan permukiman diperkotaan dan perdesaan yg nyaman sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Cakupan rumah layak huni
Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman dan perdesaan	1. Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh 2. Persentase cakupan layanan air minum rumah tangga

Dalam rangka mewujudkan target tujuan dan sasaran dari visi dan misi, pemerintah daerah telah menetapkan Kebijakan umum pembangunan yang menjadi pedoman bagi penetapan program pembangunan daerah. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan program-program yang secara langsung



menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai dengan strategi dan kebijakan umum. Program yang dimaksud merupakan penterjemahan program unggulan Gerbang Raja yang merupakan janji kampanye kepala daerah.

Program Unggulan Gerbang Raja merupakan *Dedicated Program* yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Program unggulan Gerbang Raja yang harus dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur, dengan target yang akan dicapai:
 - a. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan air bersih desa.
 - b. Kemudahan kredit untuk perumahan rakyat miskin (program rumah murah).
2. Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan target yang akan dicapai:
 - a. Diterapkannya 30% kawasan terbuka hijau.
 - b. Adanya Program Sekolah Hijau sebagai pendidikan lingkungan sekolah.
 - c. Adanya percontohan sistem daur ulang (3R) melalui "Gerakan masyarakat yang berbasis daur ulang".

Berbagai program unggulan Gerbang Raja diatas merupakan keinginan atau janji politik Bupati dan Wakil Bupati sewaktu kampanye. Untuk itu, dalam mencapai visi, misi dan sasaran pembangunan, maka program unggulan tersebut diterjemahkan ke dalam program pembangunan daerah dalam membangun Kutai Kartanegara oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: Kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energy; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan



pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan *goals* tersebut setidaknya ada 3 (tiga) sasaran strategis yang terkait erat dengan Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diwujudkan oleh Kementerian PUPR, yaitu: Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; dan Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM
Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam mensinergikan rencana pembangunan daerah serta target pembangunan nasional, menetapkan beberapa indikator kinerja bidang cipta karya, yaitu: Jumlah Rumah Layak Huni, Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, Cakupan Layanan Rumah layak huni, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum, Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak, dan Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu- isu strategis yang berkembang baik yang bersifat global, regional, nasional, maupun lokal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diuraikan sebagai berikut:



a. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs yang berlaku pada tahun 2015–2030. SDGs terdiri dari 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan, yaitu: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesejahteraan, kualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran tersebut diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan SDGs dikarenakan salah satunya sebagai ujung tombak dalam penyediaan layanan publik.

Dalam Konteks tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, secara umum Indonesia dan khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara belum berhasil memenuhi target akses kepada sanitasi dan air minum pada era MDGs dikarenakan belum optimalnya keterlibatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung terwujudnya MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Ratifikasi terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs oleh 193 negara termasuk Indonesia mengandung konsekuensi adanya peran aktif Indonesia untuk mewujudkan goals dan sasaran SDGs tidak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setidaknya terdapat 3 *goals* yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu



Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur umum dan perumahan rakyat dengan pengarusutamaan gender menjadikan gender sebagai dimensi integral dalam perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan infrastruktur umum dan perumahan rakyat yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebisaaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Lebih spesifik lagi bagaimana pengarusutamaan gender tercermin dalam standar bangunan publik.

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam juga melandasi pencapaian indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meskipun standar yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); dan pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

b. Asean Economic Community

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan Negara maju (*high income*). Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi untuk mewujudkan *high income* dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang dihadapi pada periode 2016-2020. Salah satu perkembangan ekonomi global yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah diberlakukannya *The ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean.

Tahun 2015 merupakan momentum awal bagi Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC). Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut bergulirnya AEC tersebut. Salah satu hal yang telah dilakukan yaitu dengan menerapkan berbagai strategi,



baik di daerah maupun secara nasional yang mencakup strategi bisnis dan perbankan maupun strategi regulasi yang menguntungkan baik bagi Kalimantan maupun Indonesia. Kutai Kartanegara terus berupaya menjaga dan memelihara iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), memperkuat permodalan dan infrastruktur perekonomian, serta memperbaiki layanan dan kualitas birokrasi Pemerintah.

Tujuan utama dari AEC 2015 yaitu untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi kawasan ASEAN yang tercermin dalam empat hal: (1) ASEAN sebagai aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal (*single market and production base*); (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi (*a highly competitive economic region*); (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil menengah (*a region of equitable economic development*); dan (4) ASEAN sebagai kawasan terintegrasi (*a region fully integrated in to the global economy*).

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kontribusi untuk mewujudkan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing dalam rangka menghadapi *Asean Economic Community*. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas dan memiliki daya saing.

C. Kebijakan Nasional Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selain memerhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan adalah isu strategis nasional yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 % terbawah.



Pembangunan perumahan menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur/prasarana dasar dalam RPJMN 2015 – 2019. Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal pada hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Ps. 28 H, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”, serta UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ps. 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.

Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Beberapa tantangan dalam penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah antara lain: 1. Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand). 2. Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif. 3. Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh). 4. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan. 5. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah.

Sasaran pembangunan infrastruktur / prasarana dasar sub sektor perumahan adalah terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 5,5 juta rumah tangga dan pembangunan rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen.

Arah kebijakan dan strategi di bidang perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah, antara lain:



- Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
- Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui: i) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar; ii) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank); serta iii) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan.
- Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui: i) peningkatan ekuitas Bank Tabungan Negara (BTN), Perum Perumnas, dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN); ii) mendorong BTN menjadi bank khusus perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 SMF terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf.
- Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).



Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya hunian yang layak.

Sementara itu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah :

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen;
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (supply side), peningkatan efisiensi layanan air minum (demand side), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enablingenvironment);
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum;
4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional;
5. Penciptaan lingkungan yang mendukung;
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak air (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar;
7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kawasan permukiman, pemerintah menyusun arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
- Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun



- Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

Kebijakan nasional tersebut tidak akan berhasil diwujudkan tanpa dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh OPD terkait maupun Pemerintah Daerah harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.



BAB

IV

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1. Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG HANDAL DAN BERBASIS LINGKUNGAN"

Visi ini adalah merupakan pandangan ke depan dalam pengelolaan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Teknis, Penyehatan Lingkungan serta Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan adalah merupakan salah satu rencana strategis untuk dapat menunjang Visi Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: "Menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan" serta Visi Nasional pada RPJM Nasional No. 3 yaitu : "Terwujudnya Perekonomian yang Mampu Menyediakan Kesempatan Kerja Dalam Penghidupan yang Layak Serta Memberikan Pondasi yang Kokoh Bagi Pembangunan yang Berkelanjutan ".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal



instansi pemerintah dan mengetahui fungsi-fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung pencapaiannya oleh *stakeholders*, maka Misi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni di perkotaan dan perdesaan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan kawasan.
2. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan yang berkelanjutan.
3. Melaksanakan pengelolaan persampahan dan pemakaman secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Misi ini adalah upaya - upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menunjang Misi Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: Misi Nomor 1, 2, dan 5 yakni : Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten; Meningkatkan Keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah; bersama-sama dengan SKPD lain, dan Meningkatkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi infrastruktur saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara dirasakan sudah cukup membaik, namun infrastruktur yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, mendorong sektor produksi dan pendukung pengembangan wilayah. Untuk lima tahun ke depan (2017 – 2021) tujuan yang ditetapkan Dinas Dinas Perumahan dan



Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
KETERKAITAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan kawasan	Mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, sehat, berbasis lingkungan, dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, sehat, berbasis lingkungan, dan berkelanjutan	Cakupan jalan lingkungan dan jembatan dalam kondisi baik
			Persentase Jalan dan jembatan lingkungan yang terpelihara
			Cakupan drainase/gorong-gorong lingkungan dalam kondisi baik
			Persentase Rumah layak Huni
			Persentase luas permukiman yang tertata (menurunnya permukiman kumuh)
			Jumlah Perda/Perbup Desain pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kab.Kutai Kartanegara



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan yang berkelanjutan	Mewujudkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, dan layak huni	Terwujudnya perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan layak huni	Persentase Rumah Tangga yang memiliki fasilitas sanitasi/air limbah
			Persentase RT yang berakses air bersih
Melaksanakan pengelolaan persampahan dan pemakaman secara menyeluruh dan berkelanjutan	Meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan dan pemakaman kabupaten	Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan dan pemakaman di kutai kartanegara	Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau
			Cakupan penyediaan dan pengelolaan TPA
			Cakupan penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Mewujudkan Organisasi yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Terwujudnya Organisasi yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Predikat Penilaian SAKIP
			Persentase ASN yang kompeten
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mengoptimalkan Dukungan Terhadap Kualitas Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Mengembangkan	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Teknis Secara Kualitas dan Kuantitas	Tersedianya Data – data Teknis Perencanaan Perumahan Permukiman
		Terkendalinya Pembangunan dalam Urusan	Tercapainya Kinerja Pelaksanaan



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Urusan Teknis Yang Profesional	Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kegiatan Secara Kualitas dan Kuantitas
		Terselenggaranya Informasi Teknis Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	Tersedianya Data Pelaksanaan dan Kegiatan Perumahan dan Permukiman

Target Indikator Sasaran selama periode Renstra (2017-2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.2
Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Indikator Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	EKSISTING (2016)	TARGET INDIKATOR SASARAN				
							2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan kawasan	Mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, sehat, berbasis lingkungan, dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, sehat, berbasis lingkungan, dan berkelanjutan	Cakupan Jalan lingkungan dan jembatan dalam kondisi baik	%	55,41	59,91	68,41	76,91	85,41	90,00
				Persentase jalan dan jembatan lingkungan yang dipelihara	%	40,09	33,09	26,09	19,09	12,09	9,09
				Cakupan drainase/gorong-gorong lingkungan dalam kondisi baik	%	55,41	59,91	68,41	76,91	85,41	90,91
				Persentase Rumah layak Huni	%	90,17	90,82	91,47	92,12	92,78	95,32
				Perda Desain Pengembangan perumahan dan permukiman Kab. Kukar	Dokumen						



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	EKSISTING (2016)	TARGET INDIKATOR SASARAN				
							2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase luas permukiman yang tertata (menurunnya permukiman kumuh)	%	67,57	70,47	72,71	75,28	77,85	80,18
2	Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan yang berkelanjutan	Mewujudkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, dan layak huni bagi masyarakat	Terwujudnya perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang memiliki fasilitas sanitasi/air limbah	%	0.037	0,038	0,039	0,040	0,050	0,060
				Persentase Rumah Tangga yang berakses air bersih	%	70,80	80,40	90,20	100	100	100
3	Melaksanakan pengelolaan persampahan dan pemakaman secara menyeluruh dan	Meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan dan pemakaman kabupaten	Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan dan pemakaman di kutai	Persentase pemenuhan Ruang Terbuka Hijau terhadap luas perkotaan	%	87,18	89,74	92,22	94,66	97,30	100
				Cakupan penyediaan dan pengelolaan TPA	%	29,05	45,30	63,55	81,80	100	100



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	EKSISTING (2016)	TARGET INDIKATOR SASARAN				
							2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	berkelanjutan		kartanegara	Cakupan penyediaan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum	%	0	11,11	16,66	22,22	27,77	32,22
4	Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Mewujudkan Organisasi yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Terwujudnya Organisasi yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Predikat Penilaian SAKIP	nilai	B	BB	BB	A	A	A
				Persentase ASN yang kompeten	%	49,34	65,78	82,23	98,36	100	100



4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari hasil analisis terhadap berbagai faktor-faktor penentu keberhasilan diperoleh pilihan strategi pencapaian visi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan program serta kegiatan organisasi, penyelenggaraan penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, asset organisasi serta penatalaksanaan sumber daya organisasi secara periodik dan terukur.
2. Penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur sanitasi air limbah di kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur jalan lingkungan serta infrastruktur drainase berikut operasi dan pemeliharannya guna pengembangan perumahan yang layak huni, produktif, aman dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum daerah bidang kebersihan serta penyediaan infrastruktur persampahan yang representatif.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan ruang terbuka hijau dan penyediaan infrastruktur publik yang representatif.

Kebijakan umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pendekatan *community based development* (melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat).



BAB

V

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, TARGET
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, ditetapkan 24 program pembangunan. Keterkaitan antara program dengan Misi yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. **Misi 1:** Melaksanakan pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan kawasan. Misi ini diwujudkan dengan satu program, yaitu:
1. Program rumah sehat murah Type 36, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah terbangunnya rumah sehat murah.
- B. **Misi 2:** Melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Misi ini akan diwujudkan dengan beberapa program, yaitu:
1. Program Pengembangan Perumahan, dengan indikator kinerja terpenuhinya kawasan permukiman dan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai:
 - a. Adanya kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian yang berimbang.
 - b. Terasilitasinya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai:
 - a. Tersedianya perumahan bagi rakyat miskin, dengan memberikan kemudahan kredit untuk perumahan rakyat miskin (program rumah murah).
 - b. Terasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar Permukiman berbasis masyarakat.
 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan indikator kinerja meningkatnya pembangunan jalan lingkungan perumahan.



5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam /Sosial, dengan indikator kinerja meningkatnya prasarana dan sarana perumahan Permukiman layak huni.
 6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan indikator kinerja berkurangnya banjir atau genangan air di kawasan permukiman.
- E. **Misi 3:** Melaksanakan pengelolaan persampahan dan pemakaman secara menyeluruh dan berkelanjutan. Misi ini akan diwujudkan dengan beberapa program, yaitu:
1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai:
 - a. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana air bersih
 - b. Meningkatkan ketersediaan air bersih di pedesaan, dengan meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan air bersih desa.
 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah, dengan indikator kinerja meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah kepada Masyarakat.
 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan indikator tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi perdesaan.
 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai:
 - a. Tersusunnya kebijakan dan manajemen pengelolaan sampah
 - b. Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah
 - c. Adanya sistem percontohan daur ulang *recycle, reduce, reuse* (3R) melalui gerakan masyarakat yang berbasis daur ulang
 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikator kinerja meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan indikator kinerja terwujudnya pelayanan pemakaman yang bersih, sehat, rapi dan indah yang berwawasan lingkungan.
- C. **Misi 4:** Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Misi ini akan diwujudkan dengan beberapa program, yaitu:



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator yang akan dicapai:
 - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
 - b. Terwujudnya koordinasi dan peningkatan kualitas pelayanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
3. Program Program peningkatan Disiplin Aparatur, dengan indikator kinerja meningkatnya disiplin aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kinerja meningkatnya kualitas aparatur daerah.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja yang akan dicapai:
 - a. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja pada SKPD.
 - b. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung tercapainya kinerja organisasi.

Indikator program, Kegiatan, indikator kegiatan dan target kinerja beserta pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada Lampiran.



BAB

VI

**INDIKATOR KINERJA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD. Oleh karena itu, target pencapaian empat indikator tersebut harus dijabarkan dan diprioritaskan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama kurun waktu Tahun 2017-2021.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	SATU AN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			TAHUN 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase penduduk berakses air bersih	%	60.8	70.6	80	90	100	100	100	100
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	89.52	90,17	90.82	91,47	92,12	92,78	94	94
3	Persentase luas Permukiman yang tertata	%	65	67,57	70,47	72,71	75,28	77,85	80	80
4	Persentase pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	%	87,17	87,18	89,74	92,22	94,66	97,30	100	100
5	Cakupan penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman umum	%	0	0	11,11	16,66	22,22	27,77	30	30



BAB

VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman serta perencanaan tata ruang.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, serta Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, dan pendanaan yang optimal.

Pencapaian target rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman masyarakat di Kutai Kartanegara.

Melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah melalui Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat sangat diperlukan dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman.



LAMPIRAN

Lampiran I

Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Target dan Pendanaan Indikatif

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUICOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
											Target %	Rp. (dalam Juta)	Target %	Rp. (dalam Juta)	Target %	Rp. (dalam Juta)	Target %	Rp. (dalam Juta)	Target %	Rp. (dalam Juta)	Target %	Rp. (dalam Juta)			Target %	Rp. (dalam Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan Organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional	Terwujudnya organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional	Persentase Layanan Administrasi							100	100%		100%		100%		100%		100%		100%					Sekretariat DPKP	
			1	03	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	94.44%	100%	33,905	100%	36,040	100%	38,770	100%	41,640	100%	43,410	100%	45,950	100%	239,715		
			1	03	03	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan jasa pengiriman surat menyurat 2 Jenis 8.250 Lembar setahun (41.250 Lembar selama 5 Tahun)	100	14,29%	50	14,29%	50	15,71%	55	17,14 %	60	18,57%	65	20%	70	100%	350		
			1	03	03	01		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa air, listrik dan telpon 3 Rekening Air, Listrik, Telepon	100	100%	3,507	100%	3,800	100%	4,100	100%	4,500	100%	4,800	100%	5,000	100%	25,707		



			1	03	03	01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara / izin kendaraan 225 Unit	100	225	200	225	200	225	200	225	200	225	200	225	200	225	1,200		
			1	03	03	01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa penyediaan administrasi keuangan 12 Bulan	100	11%	2,010.542	13,21%	3,000	19,72%	3,200	21,03 %	3,400	22,35%	3,600	23,66 %	3,800	100%	19,011		
			1	03	03	01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas Lantai Area kerja Yang di bersihkan	100	15%	250	18,51%	250	18,51%	250	18,51 %	300	22,22%	300	22,22 %	350	100%	1,700		
			1	03	03	01	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor Yang di Sediakan 10,587 Rim, Box, Pak, Lusin, Unit, Buah, Kotak, Roll	100	16%	500	10,587 Rim, Box, Pak, Lusin, Unit, Buah, Kotak, Roll	500	10,587 Rim, Box, Pak, Lusin, Unit, Buah, Kotak, Roll	500	10,587 Rim, Box, Pak, Lusin, Unit, Buah, Kotak, Roll	550	10,587 Rim, Box, Pak, Lusin, Unit, Buah, Kotak, Roll	550	10,587 Rim, Box, Pak, Lusin, Unit, Buah, Kotak, Roll	550	100%	3,150		
			1	03	03	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Yang di Sediakan / cetakan dan penggandaan 11.115 Blok, Rim, Lembar	100	16%	500	19,23%	500	19,23%	500	19,23 %	550	21,15%	550	21,15 %	550	100%	3,150		
			1	03	03	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 12 Bulan	0	13%	50	15,62%	60	18,75%	65	20,31 %	70	121,87 %	75	23,43 %	80	100%	400		



			1	03	03	01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Yang Tersedia / peraturan perundang undangan 30.000 Eksemplar	100	11%	100	14,28%	100	14,28%	150	21,42 %	150	21,42%	200	28,57 %	200	100%	900		
			1	03	03	01	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor Yang Tersedia 1 Paket	100	11%	100	14,28%	100	14,28%	150	21,42 %	150	21,42%	200	28,57 %	200	100%	900		
			1	03	03	01	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman 18960 Kotak/Kaleng Paket	100	15%	300	15%	300	16%	350	17%	350	18%	400	20%	400	100%	2.200		
			1	03	03	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah / ke luar daerah	100	16%	840	16%	840	16%	850	17%	900	18%	950	18%	950	100%	5.330		
			1	03	03	01	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 552.766 org/bln/ship	100	14%	24,164.88	15%	25,000	16%	27,000	17%	29,000	18%	30,000	19%	32,000	100%	167,165		
			1	03	03	01	Pemberian Tambahan penghasilan perbaikan untuk Petugas Kebersihan	Jumlah petugas kebersihan yang mendapatkan tambahan penghasilan perbaikan 806 Orang	100	16%	832.903	16%	840	16%	850	17%	860	17%	870	17%	900	100%	5,153		



			1	03	03	01		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Jumlah Petugas Kebersihan Yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan 806 Orang	100	13%	200	13%	200	17%	250	17%	250	20%	300	20%	300	100%	1,500		
			1	03	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana prasarana aparatur dibandingkan dengan kebutuhan	99.40 %	7%	2,725	15%	5,800	16%	6,550	19%	7,450	21%	8,200	23%	9,100	100%	39,825	Sekretariat DPKP	
			1	03	03	02		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan pengadaan gedung kantor 300 Buah	100	12%	325	14%	400	16%	450	18%	500	19%	550	21%	600	100%	2,825		
			1	03	03	02		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin berkala 225 Unit	100	14%	2,000	14%	2,000	15%	2,200	17%	2,500	19%	2,700	21%	3,000	100%	14,400		
			1	03	03	02		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 225 Buah/Unit/Kali	100	15%	400	15%	400	15%	400	17%	450	17%	450	19%	500	100%	2,600		
								Pengadaan Mubelir	Tersedianya Mubelir untuk aparatur 305 Apatur		0%		15%	3,000	18%	3,500	20%	4,000	23%	4,500	25%	5,000	100%	20,000		
		Persentase ASN yang Kompeten								49.34	49%		66%		82%		98%		100%		100%		100%		Bidang Sekretariat DPKP	



							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		0%	0	100%	1,725	100%	990	100%	1,995	100%	1,197	100%	2,315	100%	8,224		
							Pengadaan pakaian kerja lapangan (pasukan Kuning)	Jumlah pakaian kerja lapangan (pasukan kuning) yang di adakan 806 Orang		0%		0%		50%	350	0%		0%		50%	350	100%	600		
							Pengadaan pakaian Dinas berserta perlengkapan (Waskat)	Jumlah pakaian waskat yang di adakan 450 PNS		0%		31%	300	0%	-	0%	-	69%	400	0%	-	100%	1,300		
							Pengadaan pakaian olah raga berserta perlengkapan lainnya	Jumlah pakaian olah raga yang di adakan 450 PNS		0%		16%			450	20%	500	22%	550	24%	600	100%	2,500		
			1	03	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	100 %	100%	300	100%	1,100	100%	1,280	100%	1,448	100%	1,649	100%	1,739	100%	7,556	Bidang Sekretariat DPKP	
			1	03	03	05	Bimtek Peningkatan Pemahaman Metode dan Teknik Penyusunan : LAKIP, PPRG dan RENJA TA. 2016	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peningkatan Pemahaman Metode dan Teknik Penyusunan : LAKIP, PPRG dan RENJA 30 Orang	100	13%	200	13%	200	16%	250	19%	300	19%	300	22%	350	100%	1,600		



							Bimtek peningkatan pemahaman tentang administrasi keuangan dan kepegawai an	Meningkatkan pemahaman aparatur tentang administrasi keuangan dan kepegawaian 50 Org		0%		17%	500	19%	550	20%	600	22%	650	22%	650	100%	2,950		
			1	03	03	05	Bimtek Pertamina n	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Pertamina n 150 Orang	0	7%	100	10%	150	13%	200	20%	300	23%	350	27%	400	100%	1,500		
							Sosialisasi Peraturan kepegawai an	Meningkatny a pemahaman aparatur tentang peraturan kepegawaian 305 Orang	0	0%		16%	300	21%	300	21%	350	21%	0	0%	0	100%	950		
							Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Kepegawai an	Jumlah PNS Yang Mendapatka n Fasilitasi Kepegawaian					150		175		200		225				750		
		Predikat Penilaian SAKIP							B	B		BB		BB		A		A		A		A			
			1	03	03	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya adminsitrasi keuangan	95.60 %	100%	1,163	100%	1,920	100%	2,192	100%	2,381	100%	2,624	100%	2,821	100%	13,102		
			1	03	03	06	Penyusunan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun serta menyusun laporan Realisasi	Jumlah pelaporan penyusunan keuangan semester dan akhir tahun serta menyusun laporan	100	12%	100	18%	150	18%	150	18%	150	18%	150	18%	150	100%	850		



[illegible]

			1	03	03	06		Pendampingan Penyusunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Jumlah dokumen SPIP yang di susun 5 Dokumen	100	12%	100	18%	150	18%	150	18%	150	18%	150	18%	100%	850			
			1	03	03	06		Inventarisasi Belanja Modal Asset	Jumlah dokumen ASSET yang di susun 25 Dokumen	100	5%	50	10%	150	14%	150	19%	150	24%	150	29%	150	100%	1,050		
			1	03	03	06		Penyusunan Laporan Capaian Standarisasi Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen laporan SPM yang di susun 5 Dokumen	100	11%	100	16%	150	16%	150	16%	150	21%	200	21%	200	100%	950		
			1	03	03	06		Penyusunan laporan capaian kinerja (penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ)	Jumlah dokumen penyusunan capaian kinerja 10 Dokumen	100	9%	113.3	15%	200	19%	250	19%	250	19%	250	19%	250	100%	1,313		
								Penyusunan Anggaran kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen anggaran kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 200 Dokumen		15%	300	15%	300	18%	350	18%	350	18%	350	18%	350	100%	2,000		
								Program Pengembangan Data / Informasi	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	0	0%	0	100%	1,050	100%	1,300	100%	1,400	100%	1,550	100%	1,650	100%	6,950	Bidang Sekretriari DPP	



							Penyusunan Data Statistik sektoral	Tersedianya data / Dokumen statistik sektoral 10 Dokumen Selama 5 Tahun	0	0%		14%	150	19%	200	19%	200	24%	250	24%	250	100%	1,050		
							Evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA dan RENSTRA	Tersedianya data evaluasi kinerja RENJA dan RENSTRA 10 Dokumen	0	0%		14%	150	19%	200	19%	200	24%	250	24%	250	100%	1,050		
							Evaluasi Kinerja Pengelolaan ASSET	Tersedianya data / Dokumen evaluasi Kinerja Pengelolaan ASSET 30 Dokumen	0	0%		11%	100	17%	150	22%	200	22%	200	28%	250	100%	900		
							Evaluasi Kinerja pelaksanaan LAKIP, LPPD dan LKPJ.	Tersedianya data evaluasi kinerja LAKIP, LPPD dan LKPJ 10 Dokumen	0	0%		14%	150	19%	200	19%	200	24%	250	24%	250	100%	1,050		
							Inventarisasi Data kebutuhan penyusunan program di 18 Kecamatan	Tersedianya data kebutuhan perencanaan di 18 Kecamatan 5 Dokumen	0	0%		17%	500	19%	550	21%	600	21%	600	22%	650	100%	2,900		
Mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Persentase Jalan lingkungan dan jembatan dalam kondisi baik							52.91	55%		60%		68%		77%		85%		90%		90%		Bidang PP DPP	Tersebar di 18 Kecamatan



			1	03	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan lingkungan dan jembatan dalam kondisi baik	25%	36%	17,261	7.35%%	28,675	68,41% %	51,615	76.91 %	97,495	85.41%	97,495	93.91 %	97,495	58,33%	390,036		
							Survey Panjang Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Yang Dapat di Data	0	0		6 Kecamatan	1.000	6 Kecamatan	2.000	6 Kecamatan	2.000					18 kecamatan	5.000		
			1	03	03	15	Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Panjang jalan Lingkunganwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di bangun 150 M	509.400 M	135.840 M	200	135.840 M		135.840 M		135.840 M		135.840 M		135.840 M		1.188.600 M	200		
			1	03	03	15	Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah Kenohan	Panjang jalan wilayah kenohan yang di bangun 1000 M		100%	950	0%		0%		0%		0%		0%		100%	950		
			1	03	03	15	Pembangunan Jalan Wilayah Kota Bangun	Panjang jalan wilayah kota bangun yang di bangun 1200 M		100%	2.000	0%		0%		0%		0%		0%		100%	2.000		
			1	03	03	15	Pembangunan Jalan Wilayah Muara Muntai	Panjang jalan wilayah muara muntai yang di bangun 500 M		100%	600	0%		0%		0%		0%		0%		100%	600		
			1	03	03	15	Pembangunan Jembatan Wilayah Kembang Janggut	Panjang jembatan wilayah kembang janggut yang di bangun 8 M		100%	100	0%		0%		0%		0%		0%		100%	100		
			1	03	03	15	Pembangunan Jembatan Wilayah Muara Jawa	Panjang jembatan wilayah muara jawa di bangun 5 M		100%	411.218	0%		0%		0%		0%		0%		100%	411		



			1	03	03	15	Pembangunan Jembatan Wilayah Tenggara	Panjang jembatan wilayah tenggarong di bangun 260 M		100%	13,000	0%		0%		0%		0%		0%		100%	13,000		
			1				Pembangunan Jalan Wilayah Kecamatan	panjang jalan yang dibangun		0%		0%		33%	10,000	33%	10,000	33%	10,000	0%		100%	30,000		
							Pembangunan Jembatan Wilayah kecamatan	panjang jembatan yang dibangun		0%		0%		33%	10,000	33%	10,000	33%	10,000	0%		100%	30,000		
							Pendataan Jalan Kecipta Karya	Panjang dan Kondisi Jalan Cipta Karya di Kecamatan yang di data. semua desa di 18 Kecamatan		0%		50%	540	0%		50%	540	0%		0%		100%	1,080		Tersebar di 18 Ke c.
		Persentase Jalan dan Jembatan Lingkungan yang dipelihara							47.1	40%		33%		26%		19%		12%		10%		10%		Bidang PP DPP	Tersebar di 18 Ke c.
							Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang dipelihara	47,10%	40.09%	21,000	33.09%	21,000	26.09%	21,000	19.09 %	21,000	12.09%	21,000	5.09%	21,000	5.09%	126,000		Sebesar 4% dari Pembangunan Jalan Per tahun
							Pemeliharaan Jalan Jembatan Lingkungan di wilayah	Panjang jalan yang dipelihara		0%		50%	30,000	0%		50%	30,000	0%		0%		100%	60,000		



Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

			1	03	03	15	Pembersihan Jalur 2 ditenggarong s/d tenggarong seberang	Pajang jalur 2 tenggarong / tenggarong seberang yang mendapatkan pembersihan 18 Km	100	100%	150	0%		0%		0%		0%		0%		100%	150		
			1	03	03	15	pengadaan Instalasi dan pemasangan Gas Metan TPA Bekotok	Jumlah pengadaan instalasi dan pemasangan gas metan TPA Bekotok 10 Unit		100%	100	0%		0%		0%		0%		0%		100%	100		
			1	03	03	15	Pengadaan Tong Sampah beroda di Kecamatan Tenggarong	Jumlah pengadaan tong sampah beroda di kecamatan tenggarong 100 Unit	100	100%	125	0%		0%		0%		0%		0%		100%	125		
			1	03	03	15	Pengadaan bak Sampah Sekelurahan Panji	Jumlah pengadaan bak sampah sekelurahan panji 15 Unit		100%	112.5	0%		0%		0%		0%		0%		100%	113		
			1	03	03	15	Pengukuran Tanah Urug TPA Bekotok	Jumlah volume pengukuran tanah urug TPA Bekotok 2000 M3	100	100%	220	0%		0%		0%		0%		0%		100%	220		
			1	03	03	15	Perencanaan Jalan Pada Areal TPA Bekotok	Jumlah dokumen perencanaan jalan pada areal TPA Bekotok yang di susun 1 Dokumen		100%	125	0%		0%		0%		0%		0%		100%	125		
			1	03	03	15	Pengadaan TPS Komunal Kecamatan Tenggarong	Jumlah pengadaan TPS Komunal kecamatan tenggarong 10 Unit	100	100%	110	0%		0%		0%		0%		0%		100%	110		



			1	03	03	15	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Lingkungan	Jumlah petugas Pelayanan peningkatan Kebersihan Lingkungan 50 Orang	100	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%		100%	200		
			1	03	03	15	SATGAS ADIPURA	Jumlah SATGAS ADIPURA 15 Buah		100%	250	0%		0%		0%		0%		0%		100%	250		
			1	03	03	15	Sosialisasi 3R	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi 3R 225 orang	100	100%	200	0%		0%		0%		0%		0%		100%	200		
			1	03	03	15	Pembebasan Lahan TPA Kab. Kukar	16 Ha		100%	2,300	0%		0%		0%		0%		0%		100%	2,300		
						15	DED & Amdal TPA di Kecamatan Muara Jawa, Muara Wis, Loa Janan dan Samboja	4 Dokumen		0%		100%	4,000	0%		0%		0%		0%		100%	4,000		
						15	DED & Amdal di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Anggana, Sangasanga,	13 Dokumen		0%		0%		100%	13,000	0%		0%		0%		100%	13,000		



Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

			1	03	03	15	Pembangunan TPA di Kecamatan Muara Wis, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa	4 unit		0%		0%		100%	40,000	0%		0%		0%		100%	40,000		4 Kecamatan
						15	Pembangunan TPA di Kecamatan Kembang Janggut, Kota Bangun Tenggara, Seberang, Anggana	4 unit		0%		0%		0%		100%	40,000	0%		0%		100%	40,000		4 Kecamatan
							Pembangunan TPA di Kecamatan Tabang, Muara Muntai, Muara Kaman dan Sebulu	4 unit		0%		0%		0%		0%		100%	40,000	0%		100%	40,000		4 Kecamatan
						15	Pengadaan Penunjang Operasional TPA Alat berat di Kecamatan Muara Badak			0%		0%		100%	7,000	0%		0%		0%		100%	7,000		
						15	Pengadaan Penunjang Operasional TPA Alat berat di Kecamatan Muara Wis, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan			0%		0%		0%		100%	28,000	0%		0%		100%	28,000		



					15	Pengadaan Penunjang Operasional TPA Alat Berat diKecamat an Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun Sebulu, Tenggarong , Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Anggana, sanga-sanga, Marang Kayu			0%		0%		0%		0%	100%	91,000	0%		100%	91,000		
					15	Pengadaan Sarana Operasional Kebersihan Dump Truck, Arm Roll Truck dan Gerobak Sampah diKecamat an Muara Badak			0%		0%		100%	1,750	0%		0%	0%		100%	1,750		
					15	Pengadaan Sarana Operasional Kebersihan Dump Truck, Arm Roll Truck dan Gerobak Sampah diKecamat an Muara Wis, Loa			0%		0%		0%		100%	7,000	0%	0%		100%	7,000		



Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

[illegible]

						15	Pendampingan Pengadaan Lahan TPA Kab.Kukar			0%		100%	300	0%		0%		0%		0%		100%	300		
						15	Pendampingan Kosultasi ke PU Provinsi dan keKemeterian PU			0%		100%	200	0%		0%		0%		0%		100%	200		
						15	Studi Administrasi / lapangan Pengelolaa n Persampahan			0%		100%	200	0%		0%		0%		0%		100%	200		
			1	03	03	15	Pembersihan Drainase Dalam Kota Tenggarong	1 Kegiatan (paket)		100%	150	0%		0%		0%		0%		0%		100%	150		
			1	03	03	15	Pembersihan Sampah di Sungai dalam Kota Tenggarong	28 Orang		100%	150	0%		0%		0%		0%		0%		100%	150		
						15	Pembersihan Jalur 2 ditenggarong seberang	18 Km		100%	150	0%		0%		0%		0%		0%		100%	150		
			1	03	03	15	pengadaan Instalasi dan pemasangan Gas Metan TPA Bekotok	10 Unit		100%	100	0%		0%		0%		0%		0%		100%	100		
			1	03	03	15	Pengadaan Tong Sampah beroda di Kecamatan Tenggarong	100 Unit		100%	125	0%		0%		0%		0%		0%		100%	125		
			1	03	03	15	Pengadaan bak Sampah Sekelurahan Panji	15 Unit		100%	113	0%		0%		0%		0%		0%		100%	113		



			1	03	03	15	Pengukuran Tanah Urug TPA Bekotok	2000 M3		100%	220	0%		0%		0%		0%		100%	220			
			1	03	03	15	Perencanaan Jalan Pada Areal TPA Bekotok	1 Dokumen		100%	125	0%		0%		0%		0%		100%	125			
			1	03	03	15	Pengadaan TPS Komunal Kecamatan Tenggarong	10 Unit		100%	110	0%		0%		0%		0%		100%	110			
			1	03	03	15	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Lingkungan	50 Orang		100%	200	0%		0%		0%		0%		100%	200			
			1	03	03	15	SATGAS ADIPURA	15 Buah		100%	250	0%		0%		0%		0%		100%	250			
			1	03	03	15	Sosialisasi 3R	225 orang		100%	200	0%		0%		0%		0%		100%	200			
Mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Persentase Rumah Layak Huni							89.52	90.2%		90.8%		91.5%		92.1%		92.8%		93.5%		93.5%		Bidang PP DPKP
			1	03	03	15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah yang di Bangun Agar Layak Huni 9.587 Unit	2,480 unit	2,980	57,239	17.93	99,000	843	99,000	1.668	99,000	2.493	99,000	3.318	99,000	3.318	552,239	
							Survey Data Dalam Rangka Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Yang di Lakukan Pendataan																



							Pembangu n Rumah layak Huni di KECAMATA N Tenggarong			0%		17%	10,000	33%	20,000	50%	30,000	0%		0%		100%	60,000		
							Pembangu n Rumah layak Huni di KECAMATA N Loa janan			0%		17%	10,000	33%	20,000	50%	30,000	0%		0%		100%	60,000		
			1	03	03		Jumlah Rumah tidak Layak Huni Yang di Rehabilitasi	jumlah rumah MBR yang di rehab total 6280 unit	2480 Unit	13%	57,240	22%	99,000	22%	99,000	22%	99,000	22%	99,000	0%		100%	453,240		
							Persentase berkurangn ya rumah kategori Miskin/Tidak Layak Huni.	Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya 6,47 %	10.50%	17%	7,500	17%	7,500	17%	7,500	17%	7,500	17%	7,500	17%	7,500	100%	45,000		
			1	03	03	15	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	jumlah Rumah yang terfasilitasi BSPS	0 kecam atan	17%	250	17%	250	17%	250	17%	250	17%	250	17%	250	100%	1,500		
							Pendataan Rumah Layak Huni	Jumlah kecamatan dilakukan Pendataan 18 Kec	0	0%		0%		50%	900	50%	900	0%		0%		100%	1,800		
			1	03	03	15	BOP Pembinaan Permukima n Perumahan	Jumlah orang yang mendapatka n pembinaan Permukiman Perumahan 800 Orang		20%	250	20%	250	20%	250	20%	250	20%	250	100%	1.250	100%	1.250		
			1	03	03	15	BOP Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah orang yang mendapatka n bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS 1610 Orang		20%	250	20%	250	20%	250	20%	250	20%	250	100%	1.250	100%	1.250		



			1	03	03	15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (DAK Reguler) 5 Kecamatan		100%	877.39	0%		0%		0%		0%		0%		100%	877.39		
			1	03	03	15	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pendamping pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (DAK Reguler) 1 Kegiatan		100%	877.39	0%		0%		0%		0%		0%		100%	877.39		
			1	03	03	15	Kajian Lingkungan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Banjir Kecamatan Tabang	Luas Perumahan Yang Dilakukan Pengkajian Lingkungan		100%	800	0%		0%		0%		0%		0%		100%	800		
			1	03	03	15	Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perumahan di Kecamatan	Panjang jalan Perumahan perumahan Yang Tingkatkan		100%	400	0%		0%		0%		0%		0%		100%	400		



Mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Persentase luas permukiman yang tertata (menurunn ya permukima n kumuh)							65	65.6%		70.5%		72.7%		75.3%		77.9%		80.0%		80%			
Mewujudkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan layak huni bagi masyarakat	Terwujudnya perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi/air limbah							0.07	0.04%		0.04%		0.04%		0.04%		0.05%		0.06%		0.06%			
							Program Lingkungan Sehat perumahan	Rumah Tangga Bersanitasi	73%	74%	15,000	76%	30,000	78%	30,000	80%	30,000	81%	30,000	84%	30,000	84%	165,000		
							Penanganana n Permukima n kumuh	Berkurangnya kawasan kumuh		0%		100%	400	0%		0%		0%		0%			400		18 Kecamatan
			1	03	03	15	Fasilitasi Pembinaan Permukima n Perumahan	jumlah kecamatan yang terfasilitasi pembinaan Permukiman 18 Kec	0 kecamatan	100%	250	0%		0%		0%		0%		0%			250		
			1	03	03	15	Pelatihan Teknis Permukima n Perumahan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis perumahan 10 Orang	0 orang	33%	100	0%		33%	100	0%		33%	100	0%		30 orang	300		Luar Daerah



							Pengembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dikembangkan		0%		100%	200	0%		0%		0%		0%			200		
							Pembangunan IPLT	Jumlah IPLT yang dibangun		0%		100%	300	0%		0%		0%		0%			300		
							Pembangunan Septik Tank 13 Kecamatan, 52 Desa, 208 Titik	Jumlah Septik Tank yang terbangun		0%		22%	12,000	23%	12,600	24%	13,230	15%	8,013	16%	8,413	13 Kecamatan, 52 Desa, 208 Titik	54,256		
							Pembangunan IPAL Komunal di 5 Wilayah 13 Kecamatan, 26 Wilayah	Jumlah IPLA Komunal yang dibangun		0%		22%	9,000	23%	9,450	24%	9,923	15%	6,300	16%	6,615	13 Kecamatan, 26 Wilayah	41,288		
							Penataan Permukiman Bantaran Sungai di Perkotaan	Jumlah Permukiman bantaran sungai yang ditata 1 kws	0	33%	80,000	0%		33%	80,000	0%		0%	80,000	33%		100%	240,000		
							Penataan Permukiman Terkena/rawan Bencana	Jumlah Permukiman terkena/rawan bencana yang ditangani 3 kws	0	0%		33%	80,000	0%		33%	80,000	0%		33%	80,000	100%	240,000		
Mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan yang nyaman, aman, dan sehat berbasis lingkungan yang berkelanjutan	Persentase drainase/gorong-gorong lingkungan dalam kondisi baik							53%	55.4%		59.9%		68.41%		76.91%		85.41%		92.00%		92%			
			1	03	03	16	Program pembangu	Cakupan drainase/goro	52,91%	55.41%	2,325	59.91%	4,000	68.41%	5,000	76.91%	5,000	85.41%	5,000	93.91%	5,000	93.91%	26,325		



			1	03	03	16		Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong Wilayah Loa Kulu	Panjang Saluran Drainase / Gorong - gorong Wilayah Loa Kulu yang dibangun 200 M		100%	225	0%		0%		0%		0%		0%		100%	225		
Meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan dan pemakaman Kabupaten Kutai	Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan dan pemakaman Kabupaten Kutai	Persentase penyediaan dan pengelolaan TPU								0	0%		11.11%		16.66%		22.22%		27.77%		32.25%		32.25%			Bidang KPP DPKP
			1	03	03	20		Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	100	18%	16,450	32%	44,274	21%	30,000	11%	15,000	7%	10,000	11%	15,000	100%	130,724		
			1	03	03	20		Pembangunan sarana penunjang tempat pemakaman umum gunung Sentul (Bangunan, konstruksi jalan, dan taman)	Jumlah sarana penunjang pemakaman yang dibangun		11	3,000	0		0		0		0		0		11	3,000		
			1	03	03	20		Perencanaan Pengadaan Lahan Kuburan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan lahan kuburan di kab. Kutai Kartanegara		4	300	0		0		0		0		0		4	300		
			1	03	03	20		Pengadaan Tanah Lahan Kuburan Di Kecamatan Marangkayu	Jumlah lahan kuburan di kecamatan marangkayu yang mendapatkan pengadaaan tanah (Ha)		1	1,200	0		0		0		0		0		1	1,200		



			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan muslimin Kec. Sebulu	Jumlah sarana dan prasarana kuburan muslimin kec.sebulu yang di bangun		5	1,625	0		0		0		0		0		5	1,625		
			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Kel. Sarijaya Kec. Sanga sanga	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman kel.sarijaya ke.sanga-sanga yang di bangun (Bangunan, Taman, Konstruksi Jalan)		6	1,340	0		0		0		0		0		6	1,340		
			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jalan Sucipto Kel. Jawa Kec. Sanga sanga	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman jalan sucipto kel.jawa kec.sanga-sanga yang di bangun		100%	1,162	0%		0%		0%		0%		0%		100%	1,162		
			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan muslimin Ds. Sumber Sari Kec. Kota Bangun	Jumlah sarana dan prasarana kuburan muslimin ds. Sumber sari kec.Kota Bangun yang di bangun (Bangunan, Taman, Konstruksi Jalan)		9	927	0		0		0		0		0		9	927		



			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umum Beniris Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Jumlah sarana dan prasarana tempat pemakaman umum beniris kel.loa ipuh kec.Tenggarong yang di bangun (Bangunan, Taman, Konstruksi Jalan)		6	2,920	0		0		0		0		0		6	2,920		
			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kel. Timbau Kec. Tenggarong	Jumlah sarana dan prasarana kuburan kel. Timbau kec.Tenggarong yang di bangun		100%	2,150	0%		0%		0%		0%		0%		100%	2,150		
			1	03	03	20	Pembuatan gapura kuburan se-Kelurahan Maluhu RT. 02,03,04,05, 10 dan 19	Jumlah gapura kuburan se-Kelurahan Maluhu yang dibangun		6	300	0		0		0		0		0		6	300		
			1	03	03	20	Pengecatan Kuburan Muslimin Kec. Tenggarong	Jumlah lokasi Pengecatan Kuburan Muslimin Kec. Tenggarong		5	150	0		0		0		0		0		5	150		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Di. Kec. Muara Jawa	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Di. Kec. Muara Jawa		1	300	0		0		0		0		0		1	300		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Muara	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Muara		1	70	0		0		0		0		0		1	70		



			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Muara Kaman	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Muara Kaman		1	70	0		0		0		0		0		1	70		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Samboja	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Samboja		2	100	0		0		0		0		0		2	100		
			1	03	03	20	Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Pembersih Makam	Jumlah Peralatan Kerja Petugas Pembersih Makam yang di adakan		574	106	0		0		0		0		0		574	106		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Loa Janan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Loa Janan		1	70	0		0		0		0		0		1	70		
			1	03	03	20	Pembangunan sarana penunjang tempat pemakaman umum gunung Sentul	Jumlah sarana dan prasarana tempat pemakaman umum gunung Sentul yang di bangun (Bangunan, Taman, Konstruksi Jalan)		11	3,000	0		0		0		0		0		11	3,000		



			1	03	03	20	Perencanaan Pengadaan Lahan Kuburan di Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan kuburan di kab. Kutai Kartanegara		4	300	0		0		0		0		0		4	300		
			1	03	03	20	Pengadaan Tanah Lahan Kuburan Di Kecamatan Marangkayu	Luasan lahan kuburan di Kecamatan Marangkayu yang diadakan (Ha)		1	1,200	0		0		0		0		0		1	1,200		
			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan muslimin Kec. Sebulu	Jumlah Sarana dan prasarana kuburan muslimin di Sebulu yang dibangun		5	1,625	0		0		0		0		0		5	1,625		
			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jalan Sucipto Kel. Jawa Kec. Sanga sanga	Jumlah sarana dan prasarana tempat pemakaman umum Jalan Sucipto Kel. Jawa Kecamatan Sanga-Sanga (Bangunan, Taman, Konstruksi Jalan)		9	1,162	0		0		0		0		0		9	1,162		
			1	03	03	20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan muslimin Ds. Sumber Sari Kec. Kota Bangun	Jumlah sarana dan prasarana tempat pemakaman umum (Pagar, Pendopo 4x6, Pintu Gerbang , Bangunan)		4	927	0		0		0		0		0		4	927		



			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Di. Kec. Muara Jawa	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin di Kecamatan Muara Jawa		5	300	0		0		0		0		0		5	300		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Tenggarong	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Tenggarong		400%	200	0%		0%		0%		0%		0%		400%	200		
			1	03	03	20	Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Jl.AP.Pranoto Kec. Tenggarong Kel. Sukarame	Panjang pagar kuburan Muslimin Jl AP Pranoto Kel. Sukarame Kec. Tenggarong Seberang yang dibangun (meter)		114	200	0		0		0		0		0		114	200		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Loa Kulu	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Loa Kulu		2	110	0		0		0		0		0		2	110		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Muara Muntai	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Mara Muntai		3	150	0		0		0		0		0		3	150		



			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Muara Kaman	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kecamatan Muara Kaman		1	70	0		0		0		0		0		1	70		
			1	03	03	20	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Samboja	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan		2	100	0		0		0		0		0		2	100		
			1	03	03	20	Pengadaan Peralatan Kerja Petugas Pembersih Makam	Jumlah peralatan kerja petugas pembersih makam yang diadakan		574	106	0		0		0		0		0		574	106		
			1	03	03	20	Pemcanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kec. Loa Janan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kecamatan Loa Janan		1	70	0		0		0		0		0		1	70		
							Pembangunan sarana penunjang tempat pemakaman umum gunung Sentul	Jumlah paket sarana prasarana penunjang TPU gunung Sentul yang dibangun		0		1	6,500	0		0		0		0		1	6,500		Kec. Tenggarong
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan muslimin Kec. Sebulu	Jumlah paket sarana prasarana penunjang kuburan muslimin Kec. Sebulu		0		1	1,625	0		0		0		0		1	1,625		Kec. Sebulu



							Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Kel. Sarijaya Kec. Sangasanga	Jumlah paket sarana prasarana Pemakaman Ke. Sarijaya Kec. Sangasanga		0		1	1,340	0		0		0		0		1	1,340		Kec. Sangasanga
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Jalan Sucipto Kel. Jawa Kec. Sangasanga	Jumlah paket sarana prasarana pemakaman Jalan Sucipto Kel. Jawa Kec. Sangasanga		0		1	1,162	0		0		0		0		1	1,162		Kec. Sangasanga
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan muslimin Ds. Sumber Sari Kec. Kota Bangun	Jumlah paket sarana prasarana penunjang kuburan muslimin Ds. Sumber Sari Kec. Kota Bangun		0		1	927	0		0		0		0		1	927		Kec. Kota Bangun
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umum Beniris Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong	Jumlah paket sarana prasarana kuburan TPU Beniris Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong		0		1	2,920	0		0		0		0		1	2,920		Kec. Tenggarong
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan di Kel. Loa Tebu	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Kec. Tenggarong
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,000	0		0		0		0		1	1,000		Kec. Muara



Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Desa Muara Jawa Ilir	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,200	0		0		0		0		1	,200		Ke c. Mu ar a Ja wa
							Pembangunan Sarana dan PrasaranaKuburan Desa Muara Jawa Tengah RT 7	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,200	0		0		0		0		1	1,200		Ke c. Mu ar a Ja wa
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Desa Muara Muntai Ulu	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,000	0		0		0		0		1	1,000		Ke c. Mu ar a Mu nta i
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Desa Ponoragan	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,000	0		0		0		0		1	1,000		Ke c. Lo a Kul u
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Desa Rempanga	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	900	0		0		0		0		1	900		Ke c. Lo a Kul u
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Desa Selok Api Laut	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Ke c. Sa mb oja
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Desa Tani Bakti	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Ke c. Sa mb oja



							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Desa Tanjung Limau	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Ke c. Mu ar a Ba da k
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Gunung Uang Loa Ipuh	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Ke c. Te ng gar on g
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Kelurahan Maluhu RT 14	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Ke c. Te ng gar on g
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Kelurahan Maluhu RT 16	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Ke c. Te ng gar on g
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Kelurahan Pendingin	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	1,400	0		0		0		0		1	1,400		Ke c. Sa ng a- Sa ng a
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Muslimin Kelambu Kuning	Jumlah paket sarana prasarana kuburan		0		1	2,200	0		0		0		0		1	2,200		Ke c. Te ng gar on g
							Pengadaan Mobil Jenazah DPP	Jumlah mobil jenazah yang diadakan		0		3	1,500	0		0		0		0		3	1,500		



							Rehab Komplek Makam Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Museum Mulawarna	Jumlah paket komplek makam kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang direhab		0		1	1,500	0		0		0		0		1	1,500		Ke c. Tenggarong
							Pendataan Jumlah Kapasitas Areal Pemakaman Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah kecamatan yang didata		0		1	500	0		0		0		0		1	500		Kab. Kukar
							Pembangunan TPU di Kec. Kenohan	Jumlah Kawasan pembangunan TPU		0		0		1	5,000	0		0		0		1	5,000		Ke c. Kenohan
							Pembangunan TPU di Kec. Marangkayu	Jumlah Kawasan pembangunan TPU		0		0		1	5,000	0		0		0		1	5,000		Ke c. Marangkayu
							Pembangunan TPU di Kec. Tenggarong	Jumlah Kawasan pembangunan TPU		0		0		1	20,000	0		0		0		1	20,000		Ke c. Tenggarong
							Pembangunan TPU di Kab. Kukar	Jumlah Kawasan pembangunan TPU		0		0		0		3	5,000	0		0		3	15,000		
							Pembangunan TPU di Kab. Kukar	Jumlah Kawasan pembangunan TPU		0		0		0		0		2	10,000	0		2	10,000		



							Pembangu nan TPU di Kab. Kukar	Jumlah Kawasan Pembangu nan TPU		0		0		0		0		0		3	5,000	3	15,000		
		Persentase pemenuha n RTH terhadap luas perkotaan							87.17	87.18		89.74		92.22		94.66		97.3		100		100		Bidang KPP DPKP	
			1	03	03	24	Program Pengelolaa n Ruang Terbuka Hijau	Prosentase pemenuhan Ruang Terbuka Hijau terhadap luas perkotaan	87.17	87.18	6,860	89.74	28,500	92.22	34,050	94.66	33,600	97.30	36,350	100	37,100	100	176,460		
			1	03	03	24	Perawatan/ Pemelihara an taman - taman RTH	Jumlah lokasi Perawatan/P emeliharaan taman - taman RTH		31	2,125	31	5,500	34	5,500	38	6,500	40	7,000	45	8,000	219	34,625		
			1	03	03	24	Rehab taman simpang km 38 samboja	Luas taman simpang km 38 samboja yang di rehab (m2)		1000	200	500	250	0		0		0		0		1500	450		
			1	03	03	24	Pembuatan taman median jalan desa Bakungan Kec. Loa Kulu	Luas taman median jalan desa Bakungan Kec. Loa Kulu yang di buat		150	100	300	250	0		0		0		0		450	350		
			1	03	03	24	Rehab Taman dan Penanama n Pohon Peneduh Area Makam Pahlawan Batuah Sanga-Sanga	Luasan taman dan Penanaman Pohon Peneduh Area Makam Pahlawan Batuah Sanga-Sanga yang di rehab (m2)		100	250	0		0		0		0		0		100	250		



			1	03	03	24	Pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang dalam kota Tenggara dan Tenggara Seberang	Jumlah pohon rawan tumbang dalam kota Tenggara dan Tenggara Seberang yang di pangkas dan di tebang		200	150	250	200	200	200	150	200	150	250	150	250	1100	1,250		
			1	03	03	24	Pembersihan tanaman liar pada bahu jalan jalur dua desa teluk dalam s/d simpang patung lembuswana tenggarong seberang yang di bersihkan (2)	Luas tanaman liar pada bahu jalan jalur dua desa teluk dalam s/d simpang patung lembuswana tenggarong seberang yang di bersihkan (2)		72000	200	36000	200	36000	200	36000	200	36000	250	36000	250	252000	1,300		
			1	03	03	24	Pengadaan pot dan bunga bogenville parigata	Jumlah pot dan bunga bougenville parigata yang di adakan		400	100	500	200	400	200	400	200	400	200	400	250	2500	1,150		
			1	03	03	24	Pengadaan dan penanaman Pohon Peneduh penunjang penilaian adipura	Jumlah pohon Peneduh yang di adakan dan di tanam		250	100	200	200	200	200	200	200	200	250	200	250	1250	1,200		
			1	03	03	24	Pengadaan tempat sampah di area taman dalam Kota Tenggara	Jumlah unit Pengadaan tempat sampah di area taman dalam Kota Tenggara		100	100	0		200	200	0		0		0		300	300		



			1	03	03	24	Pengadaan Pot Ukuran Besar media tanam pohon peneduh jalur penilaian Adipura	Jumlah pot Pengadaan Pot Ukuran Besar media tanam pohon peneduh jalur penilaian Adipura		400	100	150	200	200	200	200	200	200	200	200	1350	1,100		
			1	03	03	24	Pengadaan papan himbauan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah papan himbauan RTH yang di adakan (Unit)		48	50	100	200	0	0	0	0	0	0	0	148	250		
			1	03	03	24	Pemasangan lampu tenaga surya (Energy green) dan instalasinya di taman objek penilaian Adipura	Jumlah lampu tenaga surya (Energy green) dan instalasinya di taman objek penilaian Adipura yang di pasang (Unit)		7	200	8	250	0	0	0	0	0	0	0	15	450		
			1	03	03	24	Pembuatan lampu hias tenaga surya (Energy green) di pohon peneduh	Jumlah lampu hias tenaga surya (Energy green) di pohon peneduh yang di buat (Unit)		10	200	11	250	0	0	0	0	0	0	0	21	450		
			1	03	03	24	Pemasangan lampion garden tenaga surya di area taman objek penilaian Adipura	Jumlah lampion garden tenaga surya di area taman objek penilaian Adipura yang di pasang		60	200	60	250	0	0	0	0	0	0	0	120	450		
			1	03	03	24	Pembuatan DED Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kukar	Jumlah dokumen DED Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kukar yang di buat		2	150	1	100	1	100	0	0	0	0	0	4	350		



			1	03	03	24	Penanaman pohon peneduh kec. Kota Bangun	Jumlah pohon peneduh Kec. Kota Bangun yang tanam		250	135	0		0		0		0		0		250	135		
			1	03	03	24	Pengadaan Sarana dan prasarana bermain di area taman	Jumlah Sarana dan prasarana bermain di area taman yang di adakan (Unit)		20	150	15	200	0		0		0		0		35	350		
			1	03	03	24	Pembuatan pos kontrol di area taman dan sarana pendukungnya	Jumlah pos kontrol di area taman dan sarana pendukungnya yang di buat (Unit)		2	100	15	200	0		0		0		0		17	300		
			1	03	03	24	Pembuatan gudang peralatan dan sarana pendukungnya di Area pembibitan taman Jln. Gunung Pasir	Luas gudang peralatan dan sarana pendukungnya di Area pembibitan taman Jln. Gunung Pasir yang di buat (m2)		36	150	0		0		0		0		0		36	150		
			1	03	03	24	Penanaman bibit dan pohon peneduh jalan Jongkang Arah Bandara Tenggara Seberang	Jumlah pohon Penanaman bibit dan pohon peneduh jalan Jongkang Arah Bandara Tenggara Seberang		250	100	0		0		0		0		0		250	100		
			1	03	03	24	Pendataan Luasan RTH dalam Kota Tenggara dan Tenggara Seberang	Jumlah dokumen Luasan RTH dalam Kota Tenggara dan Tenggara Seberang yang di data		1	100	0		0		0		0		0		1	100		



			1	03	03	24	Dekoratif pohon peneduh dalam kota Tenggarong	Jumlah pohon peneduh dalam kota Tenggarong yang didekorasi		250	150	1500	200	1500	200	1500	200	1500	250	1500	250	7750	1,250		
			1	03	03	24	Peningkatan/Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di lingkungan Instansi Kabupaten Kutai Kartanegara	Luas RTH Di lingkungan Instansi Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan peningkatan / pembuatan (m2)		800	900	0		0		0		0		0		800	900		
			1	03	03	24	Entrance Park dan Sarana Penunjang Taman P2KP	Luas entrance park Sarana Penunjang Taman P2KP (m2)		500	250	0		0		0		0		0		500	250		
			1	03	03	24	DED Kota Pusaka Program Pendampingan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jumlah dokumen DED Kota Pusaka Program Pendampingan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di susun 2 Dokumen		2	100	0		0		0		0		0		2	100		
			1	03	03	24	Aksi Hijau Forum Komunikasi Hijau Kab Kutai Kartanegara Penunjang Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Green	Jumlah kegiatan Aksi Hijau Forum Komunikasi Hijau Kab Kutai Kartanegara Penunjang Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Green Community 4		4	250	2	250	2	250	0		0		0		8	750		



Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara

								Pembuatan Taman Bermain dan sarana penunjang desa manunggal jaya kec. Sebulu	Luasan Taman Bermain dan sarana penunjang desa manunggal jaya kec. Sebulu yang dibangun		0		500	1,000	0		0		0		0		500	1,000		
								Pembuatan Taman Bermain di 18 kecamatan	Jumlah lokasi pembuatan taman bermain di 18 Kecamatan		0		3	3,000	4	4000	4	4000	4	5000	8	12,000	23	28,000		
								Pembuatan Tamn Zona 4 Pulau Kumala	Luasan Taman Zona 4 Pulau Kumala yang Dibangun		0		5000	1,000	0		0		0		0		5000	1,000		
								Pengadaan pot bunga gerbang raja	Jumlah Pot Bunga Gerbang Raja yang diadakan		0		200	200	200	200	200	200	200	250	200	250	200	1,100		
								Pengadaan tempat sampah di area taman dalam Kota Tenggarong			0		100	200	0		0		0		0		100	200		
								DED Program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP) Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen DED program penataan dan pelestarian Kota Pusaka (P3KP) Kab. Kutai Kartanegara		0		1	100	1	100	1	100	1	150	1	150	5	600		
								DED Tamana Lansia Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DED Tamana Lansia Kab. Kutai Kartanegara		0		1	100	0		0		0		0		1	100		



							DED Taman Pintar (Taman Edukasi) Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen DED Taman Pintar (Taman Edukasi) Kab. Kutai Kartanegara		0		1	100	0		0		0		0		1	100		
							Pengadaan Bibit Pohon Peneduh	Jumlah bibit pohon peneduh yang diadakan		0		4000	200	4000	200	4000	200	0		4000	250	16000	850		
							Pembuatan gudang peralatan dan sarana pendukungnya di Area pembibitan taman Jln. Gunung Pasir	Jumlah gudang peralatan dan sarana pendukungnya di Area pembibitan taman Jln. Gunung Pasir yang dibangun		0		1	450	0		0		0		0		1	450		
							Rehab Air Mancur Taman dalam kota Tenggarong serta sarana penunjangnya	Jumlah Air Mancur Taman dalam kota Tenggarong serta sarana penunjangnya yang direhab		0		4	250	0		0		0		0		4	250		
							Dekoratif Pot Bunga Dalam Kota Tenggarong	Jumlah Pot Bunga Dalam Kota Tenggarong yang didekorasi		0		700	200	700	200	700	200	0		700	250	2800	850		
							Pengisian Bunga Bogenfille dan Media tanam Pot Turap Pulau Kumala	Jumlah Pot Bunga Bogenfille dan Media tanam Pot Turap Pulau Kumala yang diisi		0		100	200	0		0		0		0		100	200		
							Pengadaan Tanaman Hias	Jumlah tanaman hias yang diadakan		0		4500	200	4500	200	4500	200	4000	250	4000	250	21500	1,100		



							Pengadaan Sarana dan prasarana pertamanan	Jumlah sarana dan prasarana pertamanan yang diadakan		0		80	200	80	200	80	200	80	200	80	200	400	1,000		
							Pembuatan taman kantor camat Muara Badak serta sarana penunjangnya	jumlah taman kantor camat Muara Badak serta sarana penunjangnya		0		2000	350	0		0		0		0		2000	350		
							Pembuatan taman area bermain skyboard	Jumlah taman area bermain skyboard		0		2500	500	0		0		0		0		2500	500		
							Pengadaan Dan Penanaman Pohon Peneduh Kec. Loa Kulu	Jumlah pohon peneduh Kec. Loa Kulu yang diadakan		0		200	200	0		0		0		0		200	200		
							Rehab taman parkir pulau Kumala Jln Akhmad Mukhsin yang direhab	Luasan taman parkir Pulau Kumala Jln Akhmad Mukhsin yang direhab		0		500	250	0		0		0		0		500	250		
							Pengecatan Patung naga pulau kumala	Luasan Patung naga Pulau Kumala yang dilakukan pengecatan		0		200	250	0		0		0		0		200	250		
							Pendataan Taman RTH Wilayah Tengah Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kecamatan yang didata untuk taman RTH		0		6	350	0		0		0		0		6	350		
							Pengadaan Sumur Bor di Area Taman Kota Tenggarong	Jumlah sumur bor yang dibuat di area taman Kota		0		1	250	0		0		0		0		1	250		



							Pembuatan Arena Bermain dan sarana Penunjang Perum. Arwana	Luasan arena bermain beserta sarana penunjang perum arwana yang dibangun		0		2000	500	0		0		0		0		2000	500		
							Rehab Gazebo Taman Monumen pancasila	Luasan Gazebo taman monumen Pancasila		0		9	200	0		0		0		0		9	200		
							Pengadaan Sarana Kerja Petugas Kebersihan Pulau Kumala	Jumlah Sarana kerja petugas kebersihan pulau kumla yang diadakan		0		1000	200	0		0		0		0		1000	200		
							Pembuatan Scupture Icon Fauna Khas Kutai Kartanegara di Taman Kartanegara P2KH	Jumlah Scupture Icon Fauna Khas Kutai Kartanegara di Taman Kartanegara P2KH yang dibuat		0		3	250	0		0		0		0		3	250		
							BOP Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kutai Kartanegara	Jumlah BOP Peningkatan RTH Kutai Kartanegara (Paket)		0		1	450	1	450	1	450	1	450	1	450	5	2,250		
							BOP Pendampingan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah paket BOP Pendampingan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		0		1	450	1	450	0		0		0		2	900		
							Lomba lingkungan hijau tingkat RT Kota Tenggarong	Jumlah lomba lingkungan hijau tingkat RT Kota Tenggarong		0		1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	5	2,000		



							Rehab instalasi listrik dan pasang baru meter listrik Taman Ulin dan taman PAUD	Jumlah Paket instalasi listrik dan pasang baru meter listrik Taman Ulin dan taman PAUD		0		1	500	0		0		0		0		1	500		
							Pendampingan Program P2KH dan P3KP dalam rangka koordinasi, Workshop dan FGD	Jumlah Paket pendampingan program P2KH dan P3KP dalam rangka koordinasi, workshop, dan FGD		0		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1,000		
							Pengadaan Mobil Tangki air sarana penyiraman Taman dalam kota tenggarong	Jumlah mobil tangki air yang diadakan		0		1	600	0		0		0		0		1	600		
							Program Penunjang Sekolah Adiwiyata	Jumlah program penunjang Sekolah Adiwiyata		0		1	250	2	500	2	500	0		0		5	1,250		
							Rehab Taman Median Jalan Jalur 2 desa Teluk dalam s/d simpang bukit raya Kec. Tenggarong Seberang	Luasan Taman Median Jalan Jalur 2 desa Teluk dalam s/d simpang bukit raya Kec. Tenggarong Seberang yang direhab		0		0		900	2,000	0		0		0		900	2,000		
							Penataan Taman Monumen Pancasila dan sarana Penunjangnya	Luasan taman monumen pancasila dan sarana prasarana penunjang yang ditata		0		0		6000	1,500	0		0		0		6000	1,500		



							Rehab Taman Median Jalan K.H Ahmad Muksin s/d Jln Sudirman	Luasan taman median jalan yang direhab		0		0		2500	1,000	0		0		0		2500	1,000		
							Rehab Taman Simpang Jalan K.H Ahmad Muksin Jl. Patin dan Pembuatan Ornamen khas Kalimantan	Luasan taman median jalan yang direhab		0		0		700	1,000	0		0		0		700	1,000		
							Rehab Taman Masjid Agung	Luasan taman masjid agung yang direhab		0		0		7000	500	0		0		0		7000	500		
							Pengadaan Tanah Lahan Pembibitan Pertamina n	Luasan pengadaan tanah lahan pembibitan pertamanan		0		0		10000	2,000	0		0		0		10000	2,000		
							Pengadaan Lahan Perluasan Ruang Teruka Hijau (RTH)	Luasan pengadaan tanah RTH		0		0		10500	2,000	10000	2000	10000	3,000	20000	3,000	50500	10,000		
							Pembuatan Taman Sekolah Menunjang Penilaian ADIWIYATA	Jumlah paket pengadaan taman sekolah menunjang penilaian Adiwiyata		0		0		2	500	0		0		0		2	500		
							Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias di atas Turap Tepi Mahakam Jln. K.H Ahmad Muksin	Jumlah lampu hias di atas turap tepi mahakam yang diadakan		0		0		500	1,500	0		0		0		500	1,500		



							Pembuatan Taman Depan Kantor DPP dan BM Kukar	Luasan taman depan kantor DPP dan BM Kukar yang dibangun		0		0		600	1,000	0		0		0		600	1,000		
							Pembuatan Taman Kantor Lurah Kuala Samboja Kantor Lurah Karya Merdeka dan Kantor Lurah Kampung Lama yang dibangun	Luasan Taman Kantor Lurah Kuala Samboja Kantor Lurah Karya Merdeka dan Kantor Lurah Kampung Lama yang dibangun		0		0		1000	1,500	0		0		0		1000	1,500		
							Pembuatan Taman Lansia Kab. Kutai Kartanegara	Luasan taman lansia Kab. Kukar yang dibangun		0		0		1000	2,000	0		0		0		1000	2,000		
							Pembuatan Taman Pintar (Taman Edukasi) Kab. Kutai Kartanegara	Luasan Taman pintar (taman edukasi) yang dibangun		0		0		1000	2,000	0		0		0		1000	2,000		
							Pendataan Taman RTH Wilayah Pesisir Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen pendataan Taman RTH wilayah pesisir Kukar		0		0		1	350	0		0		0		1	350		
							Pengadaan Sumur Bor di Area Taman Kota Tenggarong	Jumlah sumur bor yang dibuat di area taman Kota		0		0		5	250	0		0		0		5	250		
							Rehab Gazebo Taman Ulin	Jumlah Gazebo taman ulin yang direhab		0		0		6	200	0		0		0		6	200		



							Pengadaan Mobil Track Sarana pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang	Jumlah mobil truck sarana pemangkasan dan penebangan pohon rawan tumbang		0		0		2	900	0		0		0		2	900		
							Rebab Taman Median Jalan Jalur 2 desa bukit raya s/d simpang lembuswana Kec. Tenggarong Seberang	Luasan taman median jalan jalur 2 desa bukit dalam s/d simpang lembuswana Kec. Tenggarong Seberang yang direhab		0		0		0		9000	2,000	0		0		9000	2,000		
							Pembuatan Taman Olahraga/vitnes	Luasan taman olahraga/fitness yang dibangun		0		0		0		5000	1,500	0		0		5000	1,500		
							Pemagaran Lahan Pembibitan Peramanan	Panjang lahan pembibitan pertamanan yang dipagai		0		0		0		4000	1,500	0		0		4000	1,500		
							Pembuatan Rumah Jaga dan Gren House	Jumlah rumah jaga dan green house yang dibangun		0		0		0		3	1,000	0		0		3	1,000		
							Pembuatan Taman Bermain Rumput Setentis	Luasan taman bermain rumput sintetis yang dibangun		0		0		0		1000	2,000	0		0		1000	2,000		
							pembuatan Taman Sribangun Jembatan Martadipura Kec. Kota Bangun	Luasan taman Sribangun jembatan martadipura Kec. Kota Bangun yang dibangun		0		0		0		10000	3,000	0		0		10000	3,000		



							Penataan Warung kuliner dan Pembuatan halaman parkir Taman Ulin Lapangan Pemuda	Luasan warung kuliner dan halaman parkir taman ulin lapangan pemuda yang diatata		0		0		0		1000	2,000	0		0		1000	2,000		
							Pembuatan Taman Ungas/kebun binatang serta sarana penunjang Pulau Kumala	Luasan taman Ungas/kebun binatang serta sarana penunjang Pulau Kumala yang dibangun		0		0		0		5000	2,000	0		0		5000	2,000		
							DED Kebun Raya Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen DED Kebun Raya Kutai Kartanegara		0		0		0		1	150	0		0		1	150		
							Pendataan Taman RTH Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara	umlah dokumen Pendataan Taman RTH Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara		0		0		0		1	350	0		0		1	350		
							Rehab Taman Adipura Kukar	Luasan taman adipura kukar yang direhab		0		0		0		200	200	0		0		200	200		
							Pengadaan Mobil Kren Pengangkut Pohon, Pot dan Tempat Sampah Beton	jumlah mobil krene pengangkut pohon, pot, dan tempat sampah beton		0		0		0		1	700	0		0		1	700		
							Pengadaan Mobil Picup sarana pengangkutan pekerja pulau kumala ke lokasi kerja	jumlah mobil pick up sarana pengangkutan pekerja pulau kumala ke lokasi kerja		0		0		0		2	500	0		0		2	500		



							Pembuatan Kebun Raya Kutai Kartanegara	Luasan kebun raya Kukar yang dibangun		0		0		0		0		10000	5,000	0		10000	5,000		
							Rehab Taman PKM Tenggarong Seberang	Luasan taman PKM Tenggarong Seberang yang direhab		0		0		0		0		5000	3,000	0		5000	3,000		
							Rehab Taman Jln A.M Alimuddin	Luasan taman Jln. AM Alimuddin yang direhab		0		0		0		0		1500	1,000	0		1500	1,000		
							Rehab Taman palagan serta penambahan sarana penunjangnya Kec. Sangasanga	Luasan Taman palagan yang direhab serta penambahan sarana penunjangnya di Kec. Sangasanga		0		0		0		0		5000	2,500	0		5000	2,500		
							Rehab Taman Simpang Lembuswana Tenggarong Seberang	Luasan taman simpang Lembuswana Tenggarong Seberang yang direhab		0		0		0		0		1000	500	0		1000	500		
							Pembuatan Taman bermain Induksi Anak di pulau kumala	Luasan taman bermain Induksi anak Pulau Kumala yang direhab		0		0		0		0		5000	2,000	0		5000	2,000		
							Pembuatan Taman Bermain di Kecamatan Sebulu	Luasan taman bermain di Kec. Sebulu yang dibangun		0		0		0		0		5000	2,000	0		5000	2,000		
							Rehab Taman Pendestrian tepi sungai mahakam	Luasan taman pedestrian sungai mahakam yang direhab		0		0		0		0		1000	1,000	0		1000	1,000		
							Pembuatan Taman Gantung	Luasan taman gantung yang dibangun		0		0		0		0		500	500	0		500	500		



								Pembuatan Ornamen dalam Taman Kota Tenggarong	jumlah ornamen dalam kota tenggarong yang dibangun		0		0		0		0	20	250	0		20	250		
								Pembuatan Taman Lampion	Jumah taman lampion yang dibangun		0		0		0		0		100	1,000	100		1,000		
								Pembuatan Taman Air Mancur di Kecamatan Tenggarong	Jumlah taman air mancur yang dibangun		0		0		0		0		20	2,000	20		2,000		
								Penanama n Pohon Peneduh Are Parkir Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong Seberang	jumlah pohon peneduh area parkir gedung Puri Karang melenu		0		0		0		0		700	250	700		250		
								Rehab Taman Bidang KPP	Luasan taman bidang KPP yang direhab		0		0		0		0		700	500	700		500		
								Rehab Taman PAUD dan Sarana Bermain	Luasan taman PAUD dan sarana bermain yang dibangun		0		0		0		0		3000	500	3000		500		
								Masterplan Penataan RTH Taman Tenggarong Seberang	Jumlah dokumen penataan RTH Taman Tenggarong		0		0		0		0		1	500	1		500		
								Rehab Taman Kreativ Park	Luasan taman kreatif yang direhab		0		0		0		0		6000	1,500	6000		1,500		
								Rehab Taman tepi sungai mahakam	luasan taman tepi suangai mahakam yang direhab		0		0		0		0		3000	2,000	3000		2,000		



								Pengadaan BACKHOLDER Sarara Penanaman Pohon Peneduh	Jumlah Unit BACKHOLDER Sarara Penanaman Pohon Peneduh yang diadakan		0		0		0		0		0	1	1,500	1	1,500			
Mewujudkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan layak huni bagi masyarakat	Terwujudnya perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang berakses air bersih								60.8	70.80		80.40		90.20		100		100	100		100		100	BIDANG PL DPKP	
			1	03	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air bersih	60.80%	70.60	108,554	80.40	321,950	90.20	334,887	100%	351,621	100%	369,192	100%	387,642	100%	1,873,849		
									Cakupan Penduduk Berakses Air Minum Berbasis Masyarakat		3%	15,000	23%	100,000	23%	100,000	23%	100,000	28%	124,000	0%	-	100%	439,000		
			1	03	03	27		Lanjutan Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dan Bangunan Penangkap Air Desa Sumber Sari Kec Sebulu	Panjang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih dan Bangunan Penangkap Air Desa Sumber Sari Kec Sebulu yang di lanjutkan		3500	2,750	0		0		0		0			3500	2,750			



			1	03	03	27	Pengadaan Jaringan Pipa distribusi Air Bersih Dari jl,perumahan sewa mangkurawang menuju perumahan penduduk jalan poros rapak lambur	Panjang Jaringan Pipa distribusi Air Bersih Dari jl,perumahan sewa mangkurawang menuju perumahan penduduk jalan poros rapak lambur yang di adakan		6000	2,000	0		0		0		0		0		6000	2,000		
			1	03	03	27	Lanjutan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan pipa distribusi air bersih menuju Desa Tuana Tuha	Panjang Pemasangan Jaringan pipa distribusi air bersih menuju Desa Tuana Tuha yang di adakan		5000	2,000	0		0		0		0		0		5000	2,000		
			1	03	03	27	FS dan DED Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Muara Ritan	Jumlah dokumen FS dan DED Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Muara Ritan yang di susun 2 Dokumen		2	750	0		0		0		0		0		2	750		
			1	03	03	27	Perencanaan pembangunan sarana Air Bersih di Desa Lebak Mantan	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan sarana Air Bersih di Desa Lebak Mantan yang di susun 1 Dokumen		1	225	0		0		0		0		0		1	225		



			1	03	03	27	Lanjutan Pengadaan Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih & Accessorisnya Kecamatan Kembang Janggut	Panjang Peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih & Accessorisnya Kecamatan Kembang Janggut yang di adakan 6000 M		6000	9,200	0		0		0		0		6000	9,200		
			1	03	03	27	Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih di Desa Purwajaya	Panjang Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih di Desa Purwajaya yang diadakan		3500	2,100	0		0		0		0		3500	2,100		
			1	03	03	27	Pemasangan Jaringan Pipa dan Pompa Serta Pembuatan Reservoir Kecamatan Sebulu	Panjang Jaringan Pipa dan Pompa Serta Pembuatan Reservoir Kecamatan Sebulu yang di pasangan 2000 M		2000	2,250	0		0		0		0		2000	2,250		
			1	03	03	27	Pengadaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Jonggon	Jumlah Pengadaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Jonggon 1 Unit		1	3,500	0		0		0		0		1	3,500		
			1	03	03	27	FS dan DED Pembangunan Sarana dan Prasana Air Bersih desa Kersik	Jumlah dokumen FS dan DED Pembangunan Sarana dan Prasana Air Bersih desa Kersik yang di susun 2 Dokumen		2	700	0		0		0		0		2	700		



			1	03	03	27	FS dan DED Pembangu nan Sarana air bersih Desa Kutai Lama	Jumlah dokumen FS dan DED Pembanguna n Sarana air bersih Desa Kutai Lama yang di susun 2 Dokumen		2	700	0		0		0		0		0		2	700		
			1	03	03	27	Pembangu nan Reservoir dan Sarana Penunjangn ya di Desa Pendingin	Jumlah Reservoir dan Sarana Penunjangny a di Desa Pendingin yang di bangun 1 Unit		1	2,000	0		0		0		0		0		1	2,000		
			1	03	03	27	Lanjutan Pengadaan Jaringan Distribusi Air Bersih dan Accessories nya di Desa Beringin	Panjang Jaringan Distribusi Air Bersih dan Accessoriesny a di Desa Beringin yang di adakan		13000	3,250	0		0		0		0		0		13000	3,250		
			1	03	03	27	Pengadaan Sistem Penyediaan Air Bersih dan pipa jaringan distribusi air bersih Beserta sarana penunjangn ya di Desa Dondang	Jumlah Sistem Penyediaan Air Bersih dan pipa jaringan distribusi air bersih Beserta sarana penunjangny a di Desa Dondang yang di adakan 1 Unit		1	5,500	0		0		0		0		0		1	5,500		
			1	03	03	27	Pengadaan & Pemasanga n Jaringan Pipa Distribusi HDPE dia 150 - 75 mm Kecamatan Anggana	Panjang Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi HDPE dia 150 - 75 mm Kecamatan Anggana (M)		6970	5,000	0		0		0		0		0		6970	5,000		



			1	03	03	27	Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi HDPE Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi HDPE Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara 4900 M		4900	3,500	0		0		0		0		0		4900	3,500		
			1	03	03	27	Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi HDPE Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi HDPE Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara (M)		7600	2,000	0		0		0		0		0		7600	2,000		
			1	03	03	27	Pembangunan Water Treatment Plan (WTP) Kapasitas 50 lt/dt Badak 100 Kecamatan Muara Badak	Jumlah Water Treatment Plan (WTP) Kapasitas 50 lt/dt Badak 100 Kecamatan Muara Badak yang dibangun 1 Unit		1	5,000	0		0		0		0		0		1	5,000		
			1	03	03	27	Pembangunan sarana air bersih perdesaan dan sarana penunjangnya di Kelurahan Muara Kembang	Jumlah Pembangunan sarana air bersih perdesaan dan sarana penunjangnya di Kelurahan Muara Kembang 1 Unit		1	3,500	0		0		0		0		0		1	3,500		



			1	03	03	27	Pembangunan Water Treatment Plan (WTP) Handil 7 Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pembangunan Water Treatment Plan (WTP) Handil 7 Kecamatan Muara Jawa 1 Unit		1	6,100	0		0		0		0		0		1	6,100		
			1	03	03	27	Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Pada Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara	Panjang Pengadaan & Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Pada Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara (M)		5750	4,800	0		0		0		0		0		5750	4,800		
			1	03	03	27	BOP Pendamping Kegiatan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah daerah BOP Pendamping Kegiatan Air Bersih dan Sanitasi 12 Kali dalam daerah 3 Kali luar Daerah		9%	100	18%	200	18%	200	18%	200	18%	200	18%	200	100%	1,100		
			1	03	03	27	Pelatihan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan	Jumlah org Pelatihan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan		16	200	0		0		0		0		0		16	200		
			1	03	03	27	Pengadaan Jaringan Distribusi Air Bersih Ke Spontan dan Barong Tongkok menuju Bensamar	Panjang Pengadaan Jaringan Distribusi Air Bersih Ke Spontan dan Barong Tongkok menuju Bensamar (M)		3500	2,600	0		0		0		0		0		3500	2,600		



			1	03	03	27	Lanjutan pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih di Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman	Panjang pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih di Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman yang di kerjakan (M)		4000	4,000	0		0		0		0		0		4000	4,000		
			1	03	03	27	Pembebasan Lahan Bangunan Penangkap Air Desa Sumber Sari Kec Sebulu	Luas Lahan Bangunan Penangkap Air Desa Sumber Sari yang mendapatkan pembebasan (Ha)		1	500	0		0		0		0		0		1	500		
			1	03	03	27	Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)	Jumlah sr Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) 235 SR		235	1,072.35	0		0		0		0		0		235	1,072.35		
			1	03	03	27	Pendampingan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)	Jumlah Peralatan Kerja Petugas Pembersih Makam yang di adakan 1 Koordinasi (Paket)		1	107	0		0		0		0		0		1	107		
			1	03	03	27	Pembangunan, Supervisi dan Pengembangan Sambungan Rumah (SR) IPAL Kawasan Tenggarong	Panjang Supervisi dan Pengembangan Sambungan Rumah (SR) IPAL Kawasan Tenggarong yang di bangun (M)		7600	500	0		0		0		0		0		7600	500		



			1	03	03	27	Instalasi Pengolahan Air Minum Pedesaan Muara Pantuan	Jumlah instalasi Instalasi Pengolahan Air Minum Pedesaan Muara Pantuan 30 Instalasi		30	7,500	0		0		0		0		0		30	7,500		
			1	03	03	27	Instalasi Pengolahan Air Minum Pedesaan Muara Kembang	Jumlah instalasi Instalasi Pengolahan Air Minum Pedesaan Muara Kembang 30 Instalasi		30	7,500	0		0		0		0		0		30	7,500		
			1	03	03	27	DED dan Study Kelayakan Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengadaan Air Bersih (IPA) Kota Tenggara	Jumlah dokumen DED dan Study Kelayakan Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengadaan Air Bersih (IPA) Kota Tenggara yang di susun 2 Dokumen		2	5,000	0		0		0		0		0		2	5,000		
			1	03	03	27	Kajian Lingkungan Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengadaan Air Bersih (IPA) Kota Tenggara	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengadaan Air Bersih (IPA) Kota Tenggara yang di susun 1 Dokumen		100%	1,000	0%		0%		0%		0%		0%		100%	1,000		
			1	03	03	27	Infrastruktur Air Minum (DAK Infrastruktur Publik)	Panjang Peralatan Kerja Petugas Pembersih Makam yang di adakan (M)		4950	4,000	0		0		0		0		0		4950	4,000		



			1	03	03	27	Pendamping Infrastruktur Air Minum (DAK Infrastruktur Publik)	Jumlah kegiatan Pendamping Infrastruktur Air Minum (DAK Infrastruktur Publik) 1 Kegiatan		1	400	0		0		0		0		0		1	400		
							Pengolahan Air Bersih	Jumlah Desa yang mendapatka n program air bersih		0		18	300,000	19	315,000	20	330,750	21	347,288	22	364,652	100	1,657,68 9		
							Pembangu nan dan Pengemba ngan SPAM Perdesaan	Jumlah Desa yang mendapatka n program pembanguna n dan pengembang an SPAM		0.0		9.0	7,500	9.5	7,875	10.0	8,269	10.5	8,682	11.0	9,116	50.0	41,442		
							Pembangu nan dan Pengemba ngan Bangunan Jaringan SPAM IKK Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapatka n program pembanguna n dan pengembang an jaringan SPAM IKK		0		17	14,250	14	11,813	15	12,403	16	13,023	17	13,674	79	65,163		
							Pendampin g Fisik Untuk Desa Pamsimas	Jumlah desa yang mendapatka n pendamping an fisik Pamsimas		0		25	100,000	25	100,000	25	100,000	32	124,000	0		108	424,000		
			1	03	03	27	Pembangu nan Septic Tank / Ipal Komunal di Kec. Muara Badak, Kt Bangun, Loa Janan	Jumlah unit Pembanguna n Septic Tank / Ipal Komunal di Kec. Muara Badak, Kt Bangun, Loa Janan 1 Unit		1	1,500	0		0		0		0		0		1	1,500		
			1	03	03	27	Perencana an Septic Tank / Ipal Komunal	Jumlah unit Perencanaan Septic Tank / Ipal Komunal 20 Unit		20	250	0		0		0		0		0		20	250		



			1	03	03	27	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Infrastruktur Publik)	Jumlah unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Infrastruktur Publik) 1 Unit		1	5,000	0		0		0		0		0		1	5,000		
			1	03	03	27	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Infrastruktur Publik) 1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pendamping Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Infrastruktur Publik) 1 Kegiatan		1	500	0		0		0		0		0		1	500		
Mewujudkan kualitas bangunan yang memenuhi standar keamanan, keelamatan, dan berbasis gender	Terwujudnya kualitas bangunan yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan ramah gender	Persentase tersedianya bangunan publik							20.87	23.05%		26.17%		29.28%		32.39%		35.51%		37.00%		37%		Bidang KPP	
			1	03	03	20	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	M2 Luas Tanah yang dibebankan					26,000		26,000		26,000		26,000		26,000		130,000	Bidang KPP DPKP	
TOTAL										7%	337,939	19%	938,114	20%	1,004,988	21%	1,041,364	22%	1,115,455	12%	589,271	100%	5,027,131		

